



KOMPETISI



WWW.  
KPPU.  
GO.ID

LANGKAH CERDAS  
CEGAH KARTEL

### KANTOR PERWAKILAN DAERAH KPPU

**SURABAYA**  
Gedung Mandiri  
Jl. Basuki Rahmat No. 129-137  
Lt. 7, Ruang 703  
Surabaya 60271  
Telp. : 031-5454 4146, 534 4410  
Fax. : 031-5341 949  
Email : kpd\_surabaya@kppu.go.id

**BATAM**  
Gedung Graha Pena Lt. 3A  
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering  
Nongsa - Batam  
Kepulauan Riau 29461  
Telp. : 0778-469 337, 469 433  
Email : kpd\_batam@kppu.go.id

**BALIKPAPAN**  
Gedung BRI Lt. 7  
Jl. Sudirman No. 37  
Balikpapan  
Kalimantan Timur 76112  
Telp. : 0542-730 373  
Email : kpd\_balikpapan@kppu.go.id

**MEDAN**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 9A  
Medan  
Sumatera Utara  
Telp. : 061-414 8603  
Fax. : 061-414 8603  
Email : kpd\_medan@kppu.go.id

**MAKASSAR**  
Gedung Keuangan Negara (GKN) II  
Lt. 6, Jl. Urip Sumohardjo KM. 4  
Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang  
Kota Makassar 90232  
Telp. : 0411-429927, 429957, 429958  
Email : kpd\_makassar@kppu.go.id

**HALO HUMAS**  
021 - 34831563

**GEDUNG KPPU**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta 10120  
Telp. 021-3507015 / 16 / 43  
Fax. 021 - 3507008

**KPPU**

KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA

www.kppu.go.id infokom@kppu.go.id @KPPU KPPUINDONESIA

# KOMPETISI

Edisi 53/2016

UTAMA  
2016, TAHUN  
BERBURU KARTEL



UTAMA  
SIANG MALAM  
BERANTAS KARTEL



TESTIMONI  
ARU ARMANDO



## TAHUN BERBURU KARTEL



ISSN 1979-1259  
9 771979 125926

# BINGUNG MAU MELAPOR?





## DAFTAR ISI

### UTAMA SIANG MALAM BERANTAS KARTEL

BANYAK PIHAK YANG SEKARANG HERAN, KENAPA SEKARANG INI KPPU SERING KALI MELAKUKAN SIDAK. PADAHAL LEMBAGA INI, KHAN, BUKAN LEMBAGA PENGAWAS HARGA. PADAHAL, JIKA MAU SEDIKIT SAJA TELITI, SIDAK YANG DILAKUKAN KPPU INI SEBENARNYA EFEKTIF. SIDAK ADALAH STRATEGI (EARLY WARNING) UNTUK KARTELIS-KARTELIS DI LUAR SANA AGAR MEREKA TAHU BAHWA ADA KPPU YANG SIAP-SIAP BERGERAK JIKA MEREKA BERANI MACAM-MACAM.

<b>PORTAL</b>		
MAHASISWA HARUS TURUN TANGAN BERANTAS KARTEL		8
<b>KILAS KPD</b>		10
<b>KANAL</b>		
AGAR MERGER TAK BERUJUNG BLUNDER		14
PERJALANAN PANJANG PERKARA KARTEL SMS		15
<b>UTAMA</b>		
MENUJU INDONESIA BERDAULAT PANGAN		16
<b>M. SYARKAWI RAUF</b>		
2016, TAHUN BERBURU KARTEL		18
<b>R. KURNIA SYA'RANIE</b>		
SIANG MALAM BERANTAS KARTEL		20
<b>MOHAMMAD REZA</b>		
KPPU HARUS FOKUS PERBAIKI KOMUNIKASI		22
<b>TESTIMONI KEPALA KPD</b>		28
<b>PERSPEKTIF</b>		
<b>TAUFIK ARIYANTO</b>		
HOLDING BUMN KEUANGAN		34
<b>ARU ARMANDO</b>		
MENGENALKAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT SEJAK DINI		36
<b>PENEGAKAN HUKUM</b>		38
<b>PENCEGAHAN</b>		42
<b>EDUKASI</b>		50

## PERMOHONAN PERMINTAAN DATA

### Pertanyaan : Galuh Puspaningrum

Saat ini saya sedang melakukan desertasi, bagaimana cara mengajukan permohonan permintaan data? Karena saya membutuhkannya sebagai lampiran dari surat keterangan dari Fakultas?

### Jawaban :

*Saudari Galuh, silahkan bersurat resmi ke KPPU di alamat Jl. Juanda 36, Jakarta Pusat, Kode Pos 10120 ditujukan ke Ketua KPPU. Nanti dari Bagian Hubungan Masyarakat akan menindaklanjuti Galuh secepatnya. Salam Persaingan Sehat!*

## UU NOMOR 5 TAHUN 1999

### Pertanyaan : Hendry Juliardian

Apakah UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender dapat berlaku untuk usaha kecil juga?

### Jawaban :

*Pertama-tama kami sampaikan apresiasi pertanyaan Saudara. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa salah satu yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil (sesuai UU UMKM No. 20 Tahun 2008). Namun, jika Sdr. Hendry ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pasal 22, Hendry bisa melakukan konsultasi langsung ke KPPU, atau melalui Halo Humas di nomor 021-34831563.*

KICAU



@rchmd\_s

Emang @Telkomsel ini mahal banget. Ayo dong @KPPU dicek itu tarifnya.

@FadlyIndra

Diusut donk mengenai@telkom yang mebebaskan tagihan hantu kepada pelanggan, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya.

@IsmarSatria

Mohon diaudit lagi Telkom Indihome. Nampaknya belum serius melayani 1P dan 2P. Marketing jualan masih 3P. Pengajuan 1P personal lama.

@Pengamatpju

Tahun 2005 @KPPU bisa membongkar kasus kartel di @DISPERINERGI, dan 2016 philip beraksi kembali 774 Milyar di borong. @Kejaksanaan\_RI

@fika\_aydiw

Segera ditindak kartelnya Pak. Cc @KPPU RT"@detikcom: Harga Pangan Mahal, Mendag Sebut Pemicunya Rantai Distribusi

@dimasajoe

Indonesia darurat "kartel", harga daging dimainkan oknum "tangan tuhan" ayo di ungkap

@nur\_fikr

Selamat hari jadi yg ke 16 @KPPU. Trus maju berantas kartel, wujudkan Indonesia yg berkeadilan.

@AndyFusen

@OJKINDONESIA @jokowi Uang muka motor Honda beat msh bermain di 600 ribuan, aturan OJK UM berapa semestinya?

## KOMPETISI

**DEWAN PAKAR** : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, MBA, Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D. , Dr. Sukarmi, S.H., M.H. , Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., **PENANGGUNG JAWAB** : M. Reza,

**PEMIMPIN REDAKSI** : Dendy R. Sutrisno, **REDAKTUR PELAKSANA** : Nanang Sari Atmanta, **REDAKSI** : M. Isnaeni, Hira Puspita P. **ALAMAT REDAKSI** : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 HALO HUMAS 021-34831563 SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043 | Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id | Website: www.kppu.go.id

# INTEGRITAS

**A**da yang unik di dalam diri manusia, yakni kemampuannya untuk bertahan memegang prinsip di tengah terjanjang badai kehidupan. Ia bertahan walau terus dalam tegangan. Ia berpegang teguh walaupun terus diguncang krisis harapan. Bahkan ia rela mati, demi suatu keyakinan.

Inilah yang kiranya membuat para pejuang kemerdekaan Indonesia bertahan di tengah badai peluru tentara kolonial. Inilah yang membuat para religius bertahan di tengah dunia yang semakin banal. Inilah yang membuat para martir agama tetap yakin tak tergoyahkan. Dan ini juga yang membuat orang tua membanting tulang memberikan anaknya kehidupan. Ini yang disebut integritas.

Pun demikian dengan lembaga yang sudah berusia 16 tahun ini. Berbagai rintangan telah dihadapi. Jatuh bangun kepemimpinan juga telah dilalui. Ibarat menata masa depan, lembaga ini pernah merasakan pilu takut masa lalu. Rasa takut ini membuat organisasi kacau dalam membuat sebuah keputusan, yang pada akhirnya kadang menciptakan beberapa masalah besar.

Namun, satu yang tak pernah bisa lepas, yaitu integritas diri. Sesulit apapun, integritas menjadi sikap batin yang kokoh dipegang.

Integritas lembaga ini terus dipegang menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Integritas ini lahir dari rentetan perjalanan yang mendalam.

Saat ini cukup sulit mencari lembaga atau organisasi pemerintah yang memegang kokoh integritas. Prinsip ini dijual dengan sangat culas, seperti halnya pelaku bisnis yang tak pernah henti berlaku curang. Tidak cukup berhenti di lingkaran bisnis, bahkan, diri dan spiritualitas pun diperjual belikan. Integritas menjadi sebuah komoditas. Integritas semakin langka di tengah kehidupan manusia.

Membangun integritas Sekretariat KPPU tentunya dimulai dari membangun mentalitas individu. Tanpa adanya sistem dan birokrasi yang menggembleng mentalitas, mustahil memiliki integritas. Semua usaha akan berakhir menjadi semu, menjadi symbol dan pada akhirnya hanya sekedar rutinitas.

Tantangan yang dihadapi KPPU jelas tidak mudah. Banyaknya kasus kartel yang terjadi dibelakangan ini seakan menandai bahwa banyak pelaku bisnis culas yang terus bermain di luar sana. Sekali lagi, ini akan selalu jadi tantangan dan harus diselesaikan.

*Dirgahayu KPPU ke-16!*







PEMBACAAN PUTUSAN - Setelah melalui proses investigasi yang panjang, Selasa, (7 Juni 2016) KPPU memutuskan menghukum 32 *feedloter* yang terlibat dalam permainan harga daging sapi di Jabodetabek.



## MAHASISWA HARUS TURUN TANGAN BERANTAS KARTEL

**S**ebanyak 96 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang dipimpin oleh Dekan Hariyo Sulistyantoro melakukan kunjungan ke KPPU Jakarta, Senin (16/5/2016). Kedatangan mereka bukan untuk orasi, melainkan untuk memimba ilmu memberantas kartel di bumi pertiwi Indonesia.

Kunjungan ini merupakan kegiatan rutin studi lapangan khususnya untuk mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum. Dalam kesempatan yang sama, para mahasiswa juga menyampaikan harapan terhadap KPPU.

Para mahasiswa menilai bahwa memahami hukum persaingan usaha tidaklah mudah, karena harus menggabungkannya dengan ilmu ekonomi dalam pembuktian sebuah perkara. Selain itu, para mahasiswa juga ingin mengetahui lebih jauh bagaimana cara kerja hukum acara yang selama ini diterapkan di KPPU.



## PIMPINAN KPPU KUNJUNGI BISNIS INDONESIA GROUP

**K**etua KPPU M. Syarkawi Rauf didampingi Kepala Bagian Humas KPPU Dendy R. Sutrisno melakukan kunjungan ke Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (8/6/2016). Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan penanganan kartel di Indonesia.

Diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Arif Budi Susilo, Syarkawi melontarkan tentang pola baru penegakan hukum di KPPU, yakni pengembangan pola

sidak (inspeksi mendadak). Pola tersebut dinilai lebih ampuh untuk mencegah terjadinya kartel yang menggurita di tanah air.

Sementara itu menurut Dendy, sistem sidak itu biasanya akan melibatkan pimpinan lembaga atau departemen yang disidaknya. Kemudian dari situ, KPPU akan memberikan masukan, mana-mana saja sistem yang harus dibenahi. Bahkan bisa saja orangnya direkomendasikan untuk dipindah ketempat lain karena orang tersebut dikategorikan orang bermasalah.



## MALAM SYUKURAN HARI JADI KPPU KE-16

Ratusan pegawai KPPU mengikuti malam syukuran hari jadi KPPU ke-16 yang bertema “Bebas Kartel, Negara Makmur” yang diadakan Selasa, 7 Juni 2016 di gedung KPPU, Jakarta.

Dalam pembukaannya Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf berpesan agar seluruh elemen di Sekretariat selalu bersatu dan bekerja dengan penuh semangat. Secara khusus ia juga berpesan agar di usia yang ke-16 ini KPPU terus menjaga independensi dalam

penegakan hukum persaingan usaha.

Malam syukuran ini dihadiri oleh beberapa pejabat. Diantaranya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Syarif, Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Azam Asman Natawijana dan Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra. []



## KARENA KESEHATAN ITU PENTING

P erbaikan aksesibilitas, pelayanan, dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, KPPU menerima kunjungan dari United Nations for Development Program (UNDP) di Gedung KPPU, Jakarta, Jum’at (27/5/2016). Dalam paparannya, Ketua KPPU M. Syarkawi menuturkan bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik dibarengi dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga merupakan salah satu tujuan utama Kebijakan Paket Ekonomi XI yang dikeluarkan pemerintah. []



## AGAR PASAR MODAL SEKSI, KPPU BERI EDUKASI

P emahaman pasar modal menjadi sesuatu hal yang penting diperhatikan. Caranya lewat edukasi dan sosialisasi. KPPU menilai industri pasar modal termasuk pasar modal syariah Indonesia bertumbuh dinamis. Namun sayangnya masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami berinvestasi di pasar modal.

“Pemahaman tentang pasar modal itu penting. Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) juga harus mendorong secara sistematis agar masyarakat tertarik berinvestasi di pasar modal,” ujar Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf saat meneken kerjasama sekaligus membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7).

Kehadiran KPPU untuk mendorong edukasi kompetisi yang sehat di industri pasar modal adalah sesuatu yang sangat penting, karena pasar modal merupakan salah satu pintu masuk dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak.[]

KPD MAKASSAR

**KPD MAKASSAR GELAR FGD KEMITRAAN DI SEKTOR RITEL**



**K**antor Perwakilan Daerah (KPD) Makassar menggelar FGD tata cara pengawasan kemitraan di Aula Gedung Keuangan Negara II, Makassar pada Senin (25/4).

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel Hadi Basalamah dan dipandu langsung oleh Kepala KPD Makassar Ramli Simanjuntak.

Kurnia menjelaskan bahwa saat ini pelaku usaha kecil dipastikan memperoleh perlindungan hukum ketika bermitra dengan pemodal besar. Hal ini selaras dengan Perkom No. 1/2015, UU No. 20/2008 dan PP No. 17/2013

yang saat ini secara langsung KPPU emban.

Hal terpenting dalam kemitraan – menurut Kurnia, pelaku bisnis UMKM harus segera melaporkan perjanjian kemitraan yang telah diteken kepada pemerintah. Sehingga jika terjadi persoalan di kemudian hari bisa segera diselesaikan secara hukum.

Sementara itu Hadi Basalamah mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan promosi produk UMKM melalui berbagai event pameran, pemberian pelatihan sampai dengan pemberian modal usaha. Pihaknya juga telah meneken MoU dengan pelaku usaha ritel dan PHRI untuk memasarkan produk UMKM tanpa memungut biaya *listing fee*. □

KPD MAKASSAR

**DARI MAKASSAR BELAJAR BERMITRA**



**A**gar terhindar dari perbuatan “nakal” pelaku bisnis yang bermodal besar, KPD Makassar menggelar sosialisasi pelaksanaan Perkem Kemitraan di Hotel Aryaduta, Makassar, Kamis (28/4). Sosialisasi diikuti oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Bina

Marga dan Dinas Perkebunan di wilayah Sulsel.

Dipandu oleh Kepala KPD Makassar Ramli Simanjuntak, para peserta diperkenalkan bagaimana nantinya para pelaku bisnis UMKM bisa membangun komunikasi dengan lawan bisnisnya. Sementara itu, Chandra Setiawan,

Komisioner KPPU, menjelaskan bahwa mulai sekarang UMKM tidak perlu khawatir ketika membangun mitra. Karena instrumen hukum yang ada di tanah air sudah berjalan cukup baik, ditambah lagi sinergi dengan UU No. 5/1999.

Sementara itu Komisioner KPPU, Sukarni menuturkan bahwa saat ini pendekatan yang pemerintah lakukan melalui UU adalah melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok. Saat ini pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pengembangan UMKM melalui sejumlah cara. Diantaranya memberi kesempatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Pemda. Pemerintah dan Pemda juga diharuskan melakukan pencadangan usaha bagi UMKM melalui pembatasan usaha besar. Termasuk juga memberi kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan memfasilitasi teknologi dan informasi. □

## KPD BALIKPAPAN HARGA BAWANG MELONJAK, KPPU GELAR SIDAK



Foto: tempo.co

**K**PPU akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kenaikan harga bawang merah di sejumlah daerah, termasuk Pasar Klandasan, Balikpapan. Saat ini harga bawang merah melonjak 55 ribu per kg dari sebelumnya Rp 40 ribu per kg.

Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie menuturkan bahwa KPPU terus menurunkan tim investigator ke sejumlah daerah untuk melakukan investigasi dalam "permainan" komoditas pangan, khususnya bawang.

Bersama Anggota Komisi Tresna P. Soemardi, Kepala KPD Balikpapan Ahmad Muhari dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Suharman Tabrani KPPU terus melakukan koordinasi agar harga komoditas pangan di Balikpapan terus berada di titik stabil dan terjangkau masyarakat. Sidak ini digelar di Pasar Klandasan, Balikpapan, Jum'at(13/5). □

## KPD BALIKPAPAN PEMROV KALSEL BELAJAR ANTIKARTEL DARI KPPU



Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie menuturkan banyak terdapat peraturan perundangan di daerah yang belum proporsional.

**T**ak hanya kalangan pebisnis yang menjadi sasaran sosialisasi program kerja KPPU, kalangan pemerintah juga menjadi perhatian khusus KPPU. Apalagi perkara persaingan usaha cukup banyak didominasi perkara tender yang melibatkan pejabat pengadaan (PNS).

Bertempat di Golden Tulip Balikpapan, Senin (2/5), Wakil

Banyak terdapat kebijakan yang justru memfasilitasi terjadinya praktik kartel di daerah.

KPPU ingin mendampingi pemerintah daerah kabupaten/kota supaya bisa mempersiapkan lingkungan investasi yang baik dengan membuat regulasi yang memfasilitasi persaingan usaha sehat di lingkungan dan sektornya masing-masing. □

## KPD SURABAYA

### SUSU MURAH, SAPI PERAH JADI SAPI POTONG



koran sindo

Rauf kaget melihat fakta yang ia peroleh saat melakukan sidak di Dusun Baru, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Sabtu (4/6).

"Saya dengar ada keluhan kalau harga susu sapi disini dihargai sangat murah. Sedangkan harga pakan ternak itu terus saja melambung. Ini *khan* sesuatu yang nggak bener," ujar Syarkawi.

**P**etani peternak sapi di Malang yang sebelumnya mengandalkan produksi susu, mulai beralih menjadikan sapi sebagai sapi potong. Hal ini akibat dari murahnya harga susu sapi yang berkisar sekitar Rp 4.500 – Rp 4.800. Ketua KPPU M. Syarkawi

Seharusnya, menurut Syarkawi, secara hitungan matematis harga susu murah itu tidak terjadi, karena di Indonesia itu masih dibutuhkan 3,8 juta liter susu segar tiap harinya. Sementara secara nasional, Indonesia hanya mampu memproduksi susu sapi segar sekitar 800 liter per harinya. □

KPD SURABAYA

**SIDAK, CARA KPPU BERANTAS KARTEL**



bisnisjakarta.co.id

**K**etua KPPU M. Syarkawi Rauf menerangkan, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan lantaran banyak terjadi kartel kecil di daerah yang selama ini terjadi dan kurang tersentuh.

“Ternyata tidak hanya *pitty corruption* yang banyak terjadi di daerah, kartel-kartel kecil di daerah itu banyak sekali, banyak yang belum tersentuh. Bagaimana cara menanganinya? *Soft enforcement* (penegakan ringan) itu salah satu caranya, yaitu sidak,” ujar Syarkawi saat meninjau langsung sentra bawang merah di desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin (9/5).

Syarkawi mengaku bahwa tak semua persoalan kartel

bisa diselesaikan dengan sidak. Sebab, sidak hanya pintu untuk mengetahui sejauh mana terjadi perilaku kartel,” ujar Syarkawi.

Ketua KPD Surabaya, Aru Armando menyatakan pihaknya siap membantu Pemkab jika memang membutuhkan asistensi dalam membenahan di sektor manajemen stock. Ia menekankan bahwa untuk menangani persoalan bawang ini, Pemkab bisa mengembangkan memberikan subsidi transportasi dalam komoditas bawang. Dengan adanya subsidi, makan beban biaya transportasi yang ditanggung konsumen bisa berkurang cukup signifikan. □

KPD MEDAN

**GANDENG MITRA STRATEGIS**

**S**ebagai langkah pencegahan terjadinya praktek persekongkolan vertikal, yakni antara pejabat pengadaan dengan peserta tender, KPPU menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemprov Sumbar.

Ditemui langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di kantor dinasny, Rabu (13/4), Kepala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu mengungkapkan bahwa persekongkolan vertikal menjadi perkara yang cukup banyak ditangani KPPU. Oleh karena itu, Hakim berharap agar Sumbar bisa menjadi percontohan dalam hal pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.



Menurut Hakim, perkara-perkara yang ditangani kantor daerah KPPU hampir memiliki kesamaan, yakni didominasi dengan perkara pengadaan barang/jasa. Dimana didalamnya ada keterlibatan antara panitia pengadaan dengan peserta tender. Hal ini tentu sangat miris, mengingat pejabat pengadaan seharusnya menjadi aktor kompetisi yang sehat.

Sementara itu Irwan mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan kontrol dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahannya. Jika memang ada perilaku “nakal” dalam proses pengadaan di pemerintahannya, ia tak akan sungkan menindak tegas pejabat pengadaannya. □

KPD MEDAN

## BELAJAR BERKOMPETISI SEHAT MELALUI ABANG BECAK



**P**uluhan tukang becak motor (bentor) berkerumun di depan KPD Medan, Jl. Juanda 9A, Medan, Jum'at (10/6). Bersama-sama mereka bergerak membantu KPPU mensosialisasikan persaingan sehat di Sumatera Utara.

Kedatangan abang becak ini atas seruan Kepala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu yang menginginkan persaingan bisnis yang sehat di Medan. Hakim yakin, jika seluruh elemen rakyat menyerukan persaingan sehat, maka Medan akan menjadi kota yang bersahabat dan investor pun akan berdatangan ke Medan.

Sementara itu, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf berpesan kepada para supir bentor agar bersaing dengan sehat ketika melayani pelanggan. Ia ingin persaingan sehat di sektor transportasi ini bisa menjadi contoh riil para pelaku bisnis dan pemerintah daerah di Medan. Dengan bersaing secara sehat, maka pelanggan pun akan memperoleh kenyamanan ketika menggunakan jasa bentor.[]

KPD BATAM

## PRO PERSAINGAN, KENAPA TIDAK!



**M**eraup untung berlimpah, namun tidak mentaati peraturan, jelas bukan tujuan yang baik dalam menjalankan bisnis. Untung berlimpah harusnya diikuti taat terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini yang disampaikan Kepala KPD Batam Lukman Sungkar di depan Kepala Biro Ekonomi Suheri dan para pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Acara yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Gubernur Jambi, Senin (2/5) ini juga dihadiri oleh Plt. Deputi Pencegahan Taufik Ahmad. Dalam kesempatan itu KPPU banyak mendengar tentang berbagai kendala yang dihadapi para pejabat pengadaan dalam

menjalankan pengadaan barang/jasa yang memang sarat dengan suap dan persekongkolan.

Dari hasil pertemuan ini KPPU bersama Pemprov Jambi akan segera merumuskan kegiatan sebagai tindak lanjut. Diantaranya adalah *Training of Trainers* (ToT) Daftar Periksa Kebijakan Persaingan bagi pemerintah daerah.[]

KPD BATAM

## BELAJAR BERMITRA, KPPU BANTU PETANI KARET DI JAMBI



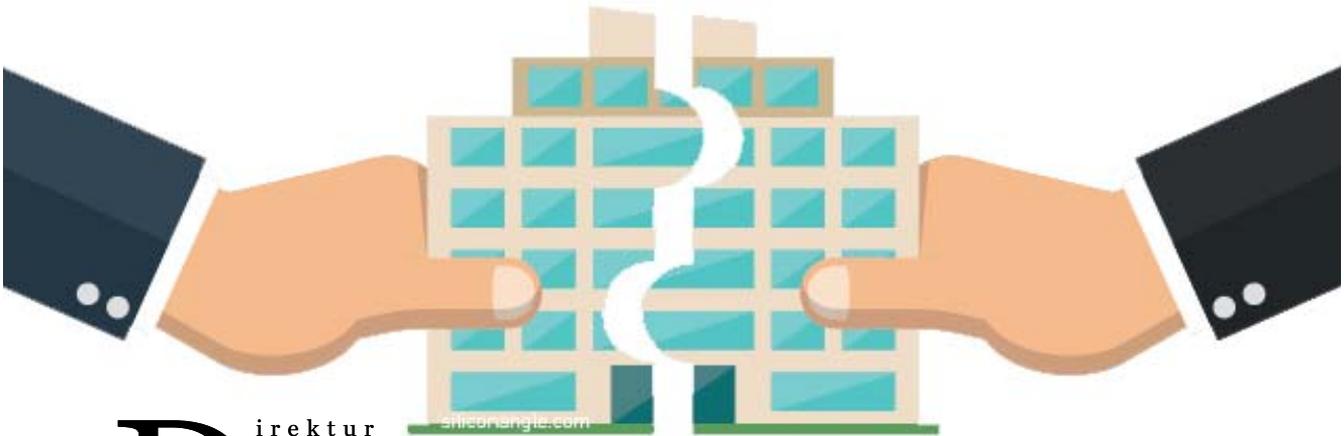
**S**atu permasalahan utama petani karet di Jambi adalah rendahnya harga jual karet. Meski sudah ada pasar lelang, tetap saja harga karet rendah. Hal ini disebabkan adanya permainan para pengepul yang bersekongkol ketika proses lelang. Hal ini terungkap ketika KPPU melakukan pertemuan dengan Tagor Mulia, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Jambi, Selasa, (12/4).

Togar menuturkan bahwa di Jambi banyak orang yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor perkebunan karet. Sayangnya, para pengepul karet menjalankan bisnis dengan tidak benar. Togar sangat berharap agar KPPU terjun langsung ke lapangan, mulai melakukan kajian dan segera mencari jalan keluar.

Sementara itu Lukman Sungkar mengatakan bahwa KPPU selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Mengingat industri karet telah menjadi penopang perekonomian masyarakat Jambi. Lukman juga akan segera mengkoordinasikan persoalan ini ke pusat.[]

MENGAPA MERGER TAK SELALU BERHASIL?

# AGAR MERGER TAK BERUJUNG BLUNDER



**D**irektur Merger KPPU Taufik Ariyanto mengungkapkan kiat-kiat yang harus dilakukan pelaku bisnis agar aksi merger dan akuisisi berhasil.

Menurut Taufik, lebih dari 50 persen akuisisi yang tidak berhasil itu disebabkan karena harga awalnya yang terlalu tinggi. Seharusnya, perusahaan membeli perusahaan dengan harga yang wajar.

Oleh karena itulah penting untuk melakukan evaluasi sebelum melakukan pembelian. Lalu kemudian, 100 hari setelah membeli perusahaan, maka harus memastikan rencana sinergi setelah akuisisi.

Ketika Masyarakat Ekonomi ASEAA (MEA) sudah berjalan seperti saat ini, para pelaku industri harus mempersiapkan pengaturan bisnisnya agar lebih efektif, efisien dan mampu bersaing di pasar regional dan global.

Berbagai studi telah memperlihatkan hasilnya, yakni persoalan sumberdaya manusia. Studi *global Price waterhouse Coopers* pada 1997 menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian terhadap manusia dan aspek organisasional telah memberi sumbangan signifikan terhadap hasil merger yang mengecewakan.

Penting untuk pertama diketahui dengan jelas apakah merger merupakan keputusan yang masuk akal. Banyak perusahaan meyakini bahwa merger dan akuisisi adalah alat-alat kunci untuk pertumbuhan—alasan ini pula yang mengemuka saat isu penggabungan BNI dan Mandiri beredar. Dengan bergabung, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, membuka pasar baru, menawarkan produk baru, mengendalikan rantai pasokan, serta mengefisienkan biaya.

Sony-Ericsson, umpamanya, bergabung untuk menyatukan keahlian Sony dalam consumer electronics dan pengetahuan teknologi Ericsson di sektor komunikasi. Daimler dan Chrysler berusaha menyatukan kekuatan otomotif mereka guna memperluas pasar di Eropa dan Amerika Utara, khususnya.

Merger lebih mungkin untuk berhasil manakala perusahaan mengevaluasi secara eksplisit sinergi yang diharapkan dari merger. Suatu studi yang pernah dilakukan oleh KPMG menemukan bahwa evaluasi ini akan meningkatkan peluang keberhasilan hingga 28% di atas rata-rata merger. Hanya dengan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai apa dan di mana nilai dapat diperoleh dari suatu kesepakatan, maka perusahaan dapat menghindari “bad deal”. (dari berbagai sumber). []

# PERJALANAN PANJANG PERKARA KARTEL SMS

**K**etika KPPU menyelidiki dan kemudian memutuskan bersalah para operator telekomunikasi di tanah air pada 2008, harusnya ini bisa menjadi pelajaran penting bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Putusan ini memberi sinyal agar pelaku usaha tidak seenaknya menetapkan suatu tarif atau harga.

Lalu kemudian pada 29 Februari 2016 keluar putusan Mahkamah Agung dengan nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 – namun baru menyebar di media pada Maret/April – yang memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antar operator.

Salah satu klausul perjanjian adalah memuat penetapan tarif SMS yang mengakibatkan terjadinya kartel harga SMS off-net pada periode 2004-2008. Waktu itu, putusan KPPU tak langsung berkekuatan hukum tetap, bahkan sempat dibatalkan PN Jakarta Pusat.



**KARTEL  
SMS**

Apa yang diputuskan MA ini adalah jalan terang dalam sebuah entitas bisnis telekomunikasi di Indonesia. Apa yang diputuskan MA adalah sebuah pembelajaran untuk spirit pembaruan menuju industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Sekarang ini tarif sudah ditentukan. Maka sudah waktunya denda tersebut dibayar ke negara, walau sebenarnya yang dirugikan rakyat. Untuk itu, Mahkamah Agung juga harus cepat mengirim salinan putusan dan menindaklanjuti agar tidak ada alasan operator untuk tidak secepatnya membayar denda yang tidak seberapa dibanding keuntungan kartelisme yang telah mereka peroleh.[]

# MENUJU INDONESIA BERDAULAT PANGAN

UNTUK MEMBANGUN BANGSA YANG BERDAULAT PANGAN, SUDAH WAKTUNYA INDONESIA HARUS MENGUBAH ARAH KIBLAT PEMBANGUNAN NASIONAL DARI PEREKONOMIAN BERBASIS IMPOR KE PEREKONOMIAN BERBASIS DOMESTIK. PELAKU KARTEL HARUS DITINDAK TEGAS, TIDAK HANYA *SHOCK THERAPY*.

**T**erwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 2. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, sesuai ayat 3, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pun demikian di sektor pangan yang merupakan cabang produksi utama dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.

Oleh karena itulah anggaran yang dialokasikan di sektor ini cukup besar. Perhatian pemerintah di era Presiden JK juga sudah terlihat dengan jelas. Hal ini bisa dilihat dari anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Pertanian (Kementan) di APBN 2015 lalu. Dalam APBN 2015, Kementerian Pertanian mendapat anggaran 15,8 triliun, sehingga total anggaran Kementan setelah APBN-P 2015 adalah 32,7 triliun.

Sayangnya, hal ini tidak kemudian menjadi swasembada pangan cepat tercapai, karena tentunya ini membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan. Lebih ironis lagi, kartelis-kartelis pangan terus saja bermunculan bak jamur di musim hujan. Kebijakan importasi yang tidak jelas, semakin menambah sulitnya negara kita berdaulat di atas tanah air.

Dalam berbagai paparannya di depan publik, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf mengatakan bahwa jika persoalan pangan ini tidak segera dicarikan jalan keluar, akan terjadi gejolak kenaikan harga.

Besarnya anggaran yang diberikan negara untuk lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola persoalan pangan juga bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Dua hal ini yang seharusnya segera diperhatikan oleh pemerintahan di era Jokowi.

Pengamat ekonomi Haryo Aswicahyono, menuturkan bahwa agenda pemberantasan kartel di sektor pangan memang sangat penting. Ditambah lagi pemerintah selama ini tidak mempunyai kendali terhadap tata niaga pangan. Struktur industri pangan juga rapuh, sehingga meminggirkan petani mandiri.

Menurut Haryo, jika kedaulatan pangan bisa dicapai Indonesia, maka hasil produksinya tidak semata untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kita tidak perlu mengimpor, karena bisa melakukan ekspor dan memberikan pemasukan untuk menambah devisa nasional.

Selain itu, sebagai negara agraris, Indonesia adalah negara yang paling diincar negara lain. Pasar Indonesia adalah pasar yang empuk, karena struktur industrinya belum berjalan dengan baik. Padahal, jika kita mampu mewujudkan kedaulatan pangan, maka kita bisa aktif membidik negara lain sebagai sasaran ekspor.

Haryo mencontohkan Thailand yang telah gencar melakukan ekspansi ke berbagai negara sejak 2014. Bahkan, Myanmar yang memiliki produksi beras





proaktif-online.blogspot.com

dalam negeri cukup baik saja jadi sasaran ekspor Thailand. Indonesia juga termasuk jadi sasaran Thailand sejak 2014.

Satu hal lagi yang membuat Indonesia semakin sulit mengejar daulat pangan – menurut Haryo – adalah persoalan besarnya tarif ekspor. Walaupun telah mampu menghasilkan produk pangan yang berkualitas, para petani dan pelaku usaha belum mampu menjangkau pasar internasional karena adanya hambatan tarif. Hal ini tentu penting untuk ditinjau kembali di mana perdagangan seharusnya mengutamakan prinsip *Fair Trade* bukan hanya sekedar *Free Trade*.

### Persoalan Struktur Pasar

Sementara itu pengamat pengamat Bustanul Arifin menambahkan bahwa pemerintah harus memiliki perhatian lebih pada struktur pasar. Karena, jika dalam industrinya sendiri bersaing dengan tidak sehat, maka kemungkinan paling besar akan terjadi korupsi dan muncul kartel. Bisa karena penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyalahgunaan posisi dominan. “Dari hulu ke hilir, itu harus diperhatikan mata rantainya. Kalau tidak, potensi kartel itu sangat besar,” ujar Bustanul.

Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan

agar Indonesia segera mencapai daulat pangan? jawabannya adalah segera mereformasi pasar (*market reform*). Reformasi pasar ini difokuskan pada tiga agenda, yaitu *regulatory review*, reformasi struktur pasar, dan perubahan perilaku.

*Regulatory review* dimaksudkan untuk menilai ulang seluruh UU, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha baru di setiap sektor strategis. Proses *regulatory review* menghasilkan rekomendasi untuk mengubah seluruh produk kebijakan yang selama ini memfasilitasi praktik monopoli.

*Regulatory review* tak dilakukan secara *ad hoc* ketika terjadi krisis saja, seperti kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang sedang berjalan. Pelembagaan *regulatory review* berbasis pada tiga pilar: persaingan usaha sehat, pelayanan publik, dan tata pemerintahan yang baik langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden karena bersifat lintas sektor.

Agenda kedua adalah reformasi struktur pasar. Agenda ini diarahkan untuk mendorong munculnya pelaku-pelaku usaha baru di setiap sektor strategis. Salah satu fokusnya adalah sektor jasa, mengingat sektor ini merupakan sektor non tradable yang paling restriktif di Indonesia.

Reformasi struktur pasar tidak untuk mematikan pelaku usaha yang sudah ada, tetapi mendorong munculnya pelaku usaha baru di setiap sektor. Hal ini dapat dilakukan seiring semakin meningkatnya ukuran ekonomi nasional yang diperkirakan sudah lebih besar dari Rp 11.000 triliun pada 2015.

Agenda ketiga adalah perubahan perilaku yang menekankan pencegahan tanpa mengabaikan penegakan hukum persaingan. Tindakan pencegahan dilakukan melalui advokasi kebijakan dengan prinsip, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran lebih baik dibandingkan menghukum, tanpa melupakan penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti bersalah.

Akhirnya, dalam jangka menengah, reformasi pasar diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional yang akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang. Reformasi pasar akan mengurangi penguasaan pasar dan selanjutnya mengurangi ketimpangan pendapatan.[]

M. SYARKAWI RAUF, KETUA KPPU

# 2016, TAHUN BERBURU KARTEL

TAHUN 2016, KPPU MENANGANI BERMACAM PERKARA KARTEL. MULAI DARI KARTEL DAGING SAPI, AYAM DAN BERAS. SEMUA ARAHNYA SAMA, KOMODITAS PANGAN. JANGAN SAMPAI KOMODITAS PANGAN INI JADI BANCAKAN PELAKU-PELAKU BISNIS CURANG DI LUAR SANA. KPPU DAN SELURUH ELEMEN PENEGAK HUKUM DI INDONESIA HARUS SATU NAFAS. MUSIM BERBURU KARTEL SUDAH KITA MULAI.



Saya ingat betul, tengah malam, saya sudah buru-buru berkemas. Ibu Kurnia berkali-kali mengingatkan, kita harus benar-benar menggali informasi dari RPH (Rumah Pematangan Hewan) yang akan kita sidak. Saat itu harga daging sapi di Jabodetabek sungguh tidak masuk akal. Tim investigator kita terjunkan. Ternyata memang betul ada yang tidak beres di luar sana.

Jika OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK itu menangkap seseorang dan tidak diketahui publik, maka sidak yang KPPU lakukan itu salah satu bentuk OTT itu sendiri. Ga mungkin, khan, KPK tangkap tangan tapi teriak-teriak dulu, yang ada malah target OTT kabur. Nah, KPPU jelas beda tangkap tangannya.

Begini, misalnya harga daging sapi di pasaran mahal. Jelas KPPU harus gerak cepat. KPPU melakukan investigasi dulu, kumpulkan bukti dan data-data di lapangan, lalu *spreading*, termasuk ke media juga. Kenapa media berperan, harus ada publikasi? Karena untuk membangkitkan *public awareness* bahwa sebenarnya ada potensi-potensi terjadi penyalahgunaan di bisnis itu sendiri. Ini juga sekaligus sebagai cara agar masyarakat juga ikut mengawal proses perkara, di samping proses hukum yang sedang berjalan di KPPU.

Sidak yang sudah beberapa kali dilakukan KPPU itu untuk mendapatkan gambaran riil dari suatu kondisi bisnis yang diduga terjadi persekongkolan. Beberapa kali sidak yang KPPU lakukan bahkan langsung kerja bareng dengan Kementerian Pertanian. Menterinya juga terlibat langsung.

Membuktikan pelaku usaha yang terlibat kartel itu bukan perkara mudah, sulit. Coba kita ingat kembali harga tiket pesawat, kartu perdana operator seluler sampai dengan harga voucher pulsa. Itu bukti konkrit yang dihasilkan dari praktek monopoli, salah satunya adalah kartel.

Kondisi yang demikian tentulah sangat bertolak belakang dengan dinamika persaingan yang membuat ekonomi bergerak pesat dan dinamis, tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah. Kini sudah banyak maskapai penerbangan yang berkembang di Indonesia, dibarengi dengan penurunan harga tiket pesawat, terlebih ketika KPPU berhasil

mengungkap praktik kartel *fuel charge* pesawat terbang. Itu hanya satu bukti kecil bagaimana terbongkarnya praktek kartel dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga dan peningkatan kualitas.

### Masa Depan Kelembagaan Jadi Prioritas

Musim berburu pelaku kartel itu penting, sangat penting. Tapi Saya dan segenap komisioner tidak akan mungkin melupakan Sekretariat. Sekarang ini anggota komisi terus melakukan konsolidasi internal kelembagaan. Dalam pemahaman demikian, suatu tata kelola dan kinerja yang berbasis kelembagaan negara harus diperbaiki, misalnya hubungan kinerja terintegrasi antara unit, biro, direktorat maupun kedeputian, juga tidak kalah pentingnya kinerja pegawai yang harus sesuai dengan aturan internal.

UU KPPU sendiri disebutkan bahwa mencegah dan memberantas kartel itu melibatkan peran serta masyarakat. Artinya apa, mereka yang dulu menjadi pencetus UU persaingan ini sadar bahwa masyarakat itu salah satu kunci sukses memberantas pelaku bisnis nakal. Masyarakat itu cerdas, mereka pasti ingin harga-harga ada di level yang normal.

Namun sayangnya, peran serta masyarakat ini kurang didengarkan pemerintah. Nah, sekarang ini eranya media sosial, kekuatan masyarakat pun akhirnya memiliki nilai tawar. Mereka bisa menyampaikannya dengan blak blakan. Ditambah lagi banyak orang di luar sana yang memiliki wawasan lebih luas, berkomitmen berbagi informasi data-data kartel. Ini tentu jadi kekuatan tersendiri bagi KPPU.

Ke depan, ada hal-hal yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki di internal KPPU. Salah satunya adalah penegakan hukum yang terintegrasi. Penegakan hukum itu tidak sederhana, laporan masuk, klarifikasi, penelitian, penyelidikan, gelar laporan pemberkasian lalu perkara

Usia lembaga ini sudah memasuki angka 16. Ini artinya akan memasuki usia dewasa, jadi kita juga harus lebih arif. Jadi begini, keberanian lembaga ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Masyarakat juga senang dengan kinerja KPPU yang sekarang. Tapi, keberanian saja itu tidak cukup. Karena yang kita hadapi sekarang punya segudang amunisi dan bahkan mereka punya kewenangan untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu.

Pengalaman saya dan anggota komisi, memberantas kartel dan persekongkolan jahat di dunia bisnis

itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena ketika “menyerempet” orang-orang yang punya kekuasaan, berpengaruh, serangan baliknya bisa kemana-mana. Bisa saja terjadi krisis, Sekretariat juga bisa jadi sasaran termasuk ketegangan antar kelembagaan yang sering kita hadapi sekarang ini.

Dulu, KPPU pernah didera krisis. Buktinya, lembaga ini mampu bangkit menghadapinya. Krisis dalam sebuah organisasi itu adalah hal yang wajar. Itu menjadi pendewasaan dan evaluasi untuk KPPU untuk terus berbenah, jadi sebuah pembelajaran.

Tugas *menjewer* pelaku usaha nakal itu juga bukan semata tugas KPPU. Di luar sana masih ada unsur penegak hukum lainnya. Ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan termasuk hakim-hakim di PN (Pengadilan Negeri) dan MA (Mahkamah Agung).

Jadi ke depannya saya berharap KPPU terus eksis. Kita harus fokus dan berkomitmen penuh pada rencana kerja yang sudah disiapkan. Kita memang utamakan pencegahan dibandingkan penindakan. Namun bukan berarti unit lain tidak menjadi fokus. Unit-unit seperti kehumasan adalah unit prioritas, disamping penegakan hukum. Kenapa saya katakan prioritas? Komunikasi kita dengan stakeholder, dengan media, ini semua yang ada di depan adalah humas. Merekalah yang harus membangun komunikasi dengan baik. Humas harus bisa mendeliver pesan yang selama ini belum bisa diterima publik dengan baik. Sehingga program-program kerja termasuk penegakan hukum itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan tentu ini bukan persoalan mudah.

Sekarang ini, agenda jangka pendek KPPU adalah memperkuat KPPU melalui amandemen UU No. 5/1999. Amandemen ini penting, mengingat perdebatan yang panjang sudah bergulir cukup lama di DPR lebih kurang setahun terakhir. Amendemen ini penting untuk memperkuat KPPU dari sisi kewenangan menemukan alat bukti, mengubah rezim notifikasi merger dari post ke pra-merger dan meningkatkan denda administrasi menjadi maksimal 500 miliar.

Termasuk di dalamnya juga memasukkan *effect doctrine* (prinsip extraterritoriality) dengan memperluas definisi pelaku usaha sebagai subyek hukum KPPU untuk mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015). □

**R. KURNIA SYA'RANIE** , WAKIL KETUA KPPU

# SIANG MALAM BERANTAS KARTEL

BANYAK PIHAK YANG SEKARANG HERAN, KENAPA SEKARANG INI KPPU SERING KALI MELAKUKAN SIDAK. PADAHAL LEMBAGA INI, KHAN, BUKAN LEMBAGA PENGAWAS HARGA. PADAHAL, JIKA MAU SEDIKIT SAJA TELITI, SIDAK YANG DILAKUKAN KPPU INI SEBENARNYA EFEKTIF. SIDAK ADALAH STRATEGI (EARLY WARNING) UNTUK KARTELIS-KARTELIS DI LUAR SANA AGAR MEREKA TAHU BAHWA ADA KPPU YANG SIAP-SIAP BERGERAK JIKA MEREKA BERANI MACAM-MACAM.



**D**ari pengalaman mengabdikan di KPPU selama ini, jumlah laporan yang masuk ke KPPU itu berbanding lurus dengan situasi di KPPU itu sendiri. Yang saya maksudkan begini, ketika kita menangani kasus-kasus besar seperti kartel, lalu mendapat perhatian media dan masyarakat, maka jumlah aduan yang masuk ke bagian pelaporan itu juga semakin meningkat.

Begitu juga saat kita mengalami situasi krisis, ketika beberapa kejadian “besar” melanda kantor kita ini, maka pelaporan atau aduan yang masuk juga menurun.

Menangani kasus seperti kartel, atau sidak di pagi-pagi buta, itu persoalan bagaimana kita menangani komoditas pangan yang selama ini tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Padahal, persoalan pangan itu menyangkut mayoritas kehidupan masyarakat kita. Nah, persoalannya, ketika kita usik mereka (pelaku usaha pangan), ini artinya kita juga mengusik para penguasa.

Karena mereka punya kekuasaan, mereka memiliki segudang pendukung yang siap menyerang balik KPPU ini. Mereka punya uang, mereka punya kuasa, untuk menyerang KPPU itu persoalan mudah. Tentunya mereka bermain cantik. Ada yang dulu menggugat lewat Mahkamah Konstitusi, ada yang mengirimkan aduan ke istana, banyak sekali cara mereka lakukan.

Kejadian demi kejadian yang dialami KPPU tahun 2016 ini ada banyak hikmahnya. Pertama, untuk bekerja menegakkan hukum persaingan harus

mulai hati-hati. KPPU ini saya rasa lembaga *super body*. Karena merasa *super body*, kadang koordinasi dan komunikasi kita dengan pihak lain menjadi berkurang, karena merasa lebih tinggi ketimbang yang lain.

Beberapa kasus atau persoalan koordinasi informal bahkan kadang jauh lebih efektif daripada komunikasi formal. Dulu kita sering bangga Mahkamah Agung cukup berpihak dalam menangani perkara kasasi. Padahal sekarang, justru strategi pencegahan adalah metode baru untuk menegakkan hukum persaingan.

Jadi, sekarang ini yang perlu diperbaiki adalah soal komunikasi. Artinya, sebagai satu-satunya lembaga yang menangani perkara hukum persaingan usaha di Indonesia kita tidak bisa berdiri sendiri. KPPU itu ada di Jakarta, kantor daerahnya hanya ada di lima daerah; Surabaya, Makassar, Batam, Medan dan Balikpapan. Dengan kekuatan yang tidak seberapa ini tentunya masih sangat kurang untuk melawan pelaku kartel. Jangan sampai KPPU bekerja sendiri.

Pun demikian dengan ketidakpercayaan beberapa pihak yang masih saja meneror KPPU. Ini harus jadi cambuk untuk kita, supaya kita terus berbenah, terus memperbaiki lembaga ini. Tanpa koordinasi, tanpa komunikasi, jelas kita tidak bisa berburu kartelis-kartelis di luar sana. □

**MOHAMMAD REZA**

KEPALA BIRO HUKUM,  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

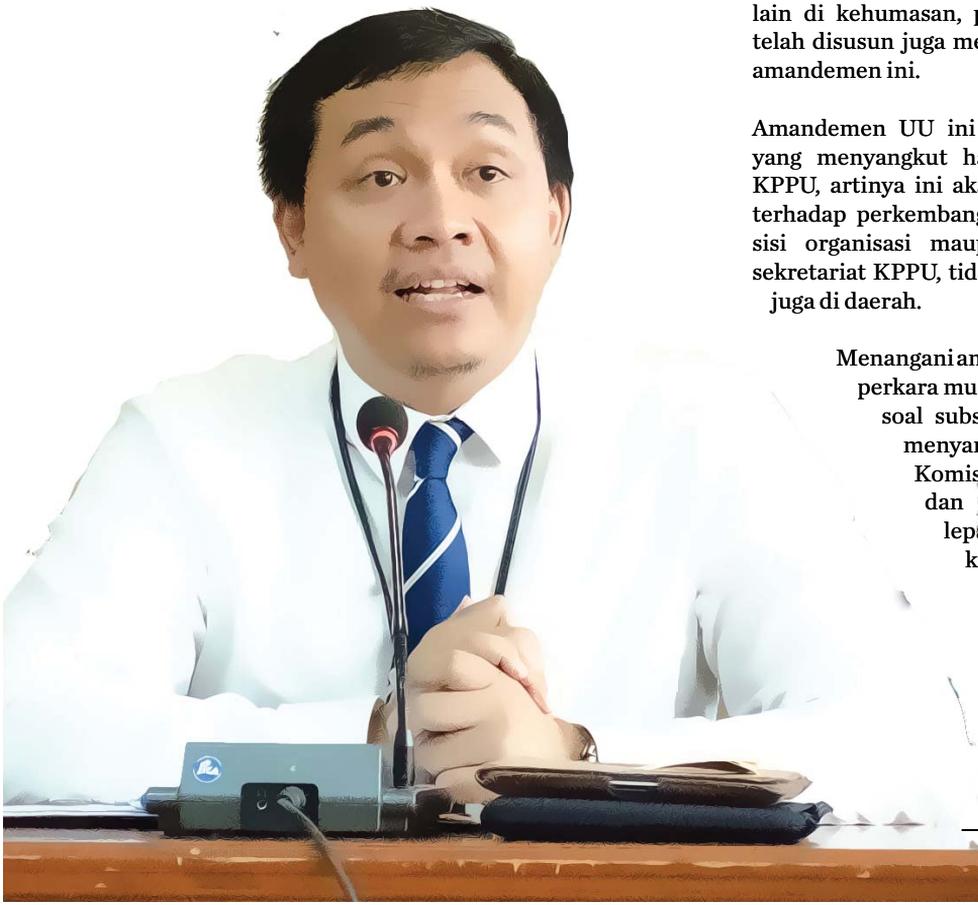
# KPPU HARUS FOKUS PERBAIKI KOMUNIKASI

KPPU HARUS MEMPERBAIKI STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN LEMBAGA LAIN. APALAGI SAAT INI SEDANG PROSES REVISI UNDANG-UNDANG YANG JELAS MEMBUTUHKAN DUKUNGAN BANYAK PIHAK. SAYA SANGAT YAKIN, JIKA KOMUNIKASI BAIK, MAKA BANYAK PERSOALAN BISA DISELESAIKAN.

**B**eberapa waktu ini waktu saya terkuras cukup banyak untuk mengejar penyelesaian amandemen UU kita sebagaimana amanat Pimpinan Komisi. Tidak hanya dari sisi kinerja yang saya sebenarnya merasa sedikit menganaktirikan bagian lain di kehumasan, program-program yang telah disusun juga menjadi terkalahkan oleh amandemen ini.

Amandemen UU ini jelas tantangan besar yang menyangkut hajat hidup Sekretariat KPPU, artinya ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga, baik dari sisi organisasi maupun para pegawai di sekretariat KPPU, tidak hanya dipusat tetapi juga di daerah.

Menangani amandemen UU itu bukan perkara mudah, karena tidak hanya soal substansi UU saja, namun menyangkut kelembagaan Komisi dan sekretariat dan tentunya tidak akan lepas dari politik. Jadi komunikasi antara KPPU dengan legislatif dan pemangku kepentingan lainnya harus terus saya jaga.



Tim amandemen yang sekarang bekerja itu membagi tugas, supaya bisa bekerja secara sistematis dan terencana. Tim yang menangani Organisasi dan SDM, membangun soliditas internal dan mencari bentuk yang pas dan terbaik untuk KPPU ini. Di tim eksternal, saya dan tim hukum, memberikan masukan-masukan substansi terbaik bagi amandemen dan membangun hubungan dengan banyak pihak. Mulai dari pemerintah, anggota dewan sampai dengan sosok-sosok yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk dalam penyusunan sebuah kebijakan.

Di periode pimpinan yang sekarang, Ketua dan Wakil Ketua KPPU sungguh memberikan suntikan positif di tubuh KPPU. Pihak-pihak yang sebelumnya memandang sebelah mata lembaga KPPU, sekarang memberikan nilai plus.

Teman-teman di Sekretariat pun demikian, suntikan segar berupa kepastian kenaikan honor, tunjangan hampir pasti mendekati kepastian. Tentu apa yang telah dicapai ini harus diimbangi dengan perbaikan kualitas kinerja. Sekretariat harus mulai berbenah.

Menjadi bagian dari keluarga besar KPPU ini bukan perkara mudah, baik itu komisioner ataupun staf karena setiap pegawai dan pimpinan KPPU itu harus siap dikriminalisasi atau difitnah. Siapa pun pemimpin KPPU, harus siap mengorbankan segalanya. KPPU pernah mengalami pasang surut kepemimpinan. Dan pada akhirnya kita bisa bangun. Hal seperti ini KPPU harus terus mempertahankan integritas. Menjaga integritas itu nomor satu.

Jadi yang perlu dijadikan keyakinan setiap insan di KPPU ini adalah persoalan integritas. Tidak melulu soal keluar masuk pegawai yang menyeberang ke lembaga lain. Soliditas internal di Sekretariat, baik pusat maupun daerah itu harus terus dipupuk. Soliditas bisa dipupuk melalui beberapa cara. Yang *pertama* dan itu wajib, motivasi masuk KPPU, itu visinya harus disamakan.

Lalu *kedua*, orang masuk KPPU motivasinya ingin mengembangkan keilmuan ilmu hukum dan ilmu ekonomi, lalu fokus menangani perkara. Tapi selang beberapa tahun kemudian setelah menguasai ilmunya, mengundurkan diri lalu mendirikan atau gabung dengan kantor advokat dan muncul sebagai pembela terlapor di sidang saat berperkara di KPPU. Hal ini tentu hak masing-

masing individu tetapi tentu saja dampaknya besar bagi KPPU. Hal-hal seperti ini harus dicarikan jalan keluarnya. Segenap pimpinan harus duduk bersama memikirkan.

Yang *ketiga*, soal kepastian jenjang karir. Mau tidak mau, teman-teman staf yang sudah lama mengabdikan KPPU itu khan butuh kepastian jenjang karir. Mereka ini membutuhkan masa depan dalam persoalan karirnya, karena ini tidak melulu soal bagaimana ego mereka berkembang, tapi juga soal masa depan individu masing-masing. Nah, ini perlu dipikirkan juga oleh pimpinan kita.

Dibandingkan tahun-tahun lalu, sekarang KPPU cukup mendapatkan sorotan dari media. Ambil sisi positifnya, karena nama KPPU jadi lebih didengar. Presiden dan Wapres beberapa kali mengundang Anggota Komisi untuk hadir memberikan masukan terkait kebijakan perekonomian negara. Menteri Pertanian apalagi, sudah cukup intens komunikasi yang kita bangun. Ini semua karena media. Jadi, media ini mari kita jadikan mitra strategis. Mari terus kita perbaiki cara kita berkomunikasi dengan media. Sudah waktunya teman-teman wartawan yang sering ‘nongkrong’ di KPPU itu memiliki ruang khusus, supaya juga merasa menjadi anggota keluarga KPPU.

Berkomunikasi itu penting. Komunikasi ini, dalam arti positif, bisa mempengaruhi pimpinan antarlembaga. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Kemudian, memperbaiki tata cara konsultasi kita dengan pihak luar. Misalnya, jika ada pelaku usaha atau peneliti yang datang ke kantor untuk konsultasi, sudah sepantasnya kita berbagi ilmu hukum persaingan usaha. Dalam hal ini teman-teman di bagian humas dan hukum bisa saling bersinergi. Halo Humas yang sudah dirintis harus terus dikembangkan. Supaya pihak luar yang ingin mengakses langsung ke KPPU bisa terfasilitasi. Karena jika kita tidak membuka lebar ilmu yang kita kuasai, akan menimbulkan banyak wasangka. Ini, khan, bisa menimbulkan beragam persepsi.

Lalu, perbaiki dari sisi pimpinan. Pimpinan yang sekarang sering mendatangi langsung ke tempat kerja pegawai dari lantai dasar sampai lantai teratas Gedung KPPU. Hal-hal seperti ini harus kita apresiasi. Ini tujuannya baik, ingin memastikan bahwa Sekretariat benar-benar mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk KPPU. Ini perubahan mendasar, dan sangat positif. □



# KENAPA SETIAP PUASA DAN LEBARAN HARGA KOMODITAS PANGAN NAIK?

*Seorang pedagang menata sayuran | tangerangrayaonline.com*

**M**emasuki bulan suci penuh berkah, yakni Ramadhan, lalu kemudian lanjut ke Idul Fitri, selalu ditandai dengan naiknya harga berbagai komoditas pangan. Hal ini bisa dibilang menjadi 'tradisi' dimana di kedua momen ini selalu ada kenaikan harga yang seringkali tidak masuk akal.

Biasanya, kenaikan harga komoditas pangan berkisar di angka 20 persen. Sedangkan pada 2015 lalu, kenaikannya mencapai hingga 40 persen. Sayangnya, masyarakat kita menganggap hal ini adalah sesuatu yang biasa dan wajar, harus dimaklumi. Demikian juga dengan kepanikan masyarakat kita pun selalu sama tiap tahunnya.

Hal ini bisa kita lihat bagaimana masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang besar. Alasannya secara umum adalah 'jaga-jaga' kalau-kalau ada kenaikan harga lagi. Tentu hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada kenaikan harga komoditas pangan itu sendiri.

Dari sini bisa dipetakan, apa hal yang sebenarnya mempengaruhi kenaikan harga komoditas pangan? apakah karena permintaan konsumen yang tinggi sehingga berimbas menjadi demikian, ataukah ada faktor lain, kartel misalnya?

#### **Permintaan Pasar (Konsumen) selalu Naik Saat Puasa dan Lebaran**

Permintaan pasar yang tinggi adalah salah satu penyebab harga komoditas pangan menjadi naik drastis. Hal ini tentunya membuat stok di berbagai pasar terhadap komoditas-komoditas tertentu semakin menipis, hingga akhirnya harga merangkak naik. Untuk itulah biasanya pemerintah (pemerintah daerah) seringkali melakukan operasi pasar untuk menjaga stok agar tetap aman.

Tidak berhenti di situ, produsen yang belum memiliki kemampuan mumpuni untuk memenuhi stok akhirnya kewalahan, karena produsen ini hanya mampu memenuhi segelintir permintaan.

#### **Distribusi Komoditas dari Wilayah Asal**

Distribusi komoditas juga ikut berpengaruh terhadap melambungannya harga komoditas pangan, hal ini dapat dilihat dari pengiriman komoditas yang berasal dari suatu wilayah akan didistribusikan ke berbagai wilayah lainnya.

Seperti contoh pada distribusi daging sapi yang banyak disuplai dari wilayah Nusa Tenggara dan

Bali, terkadang mengalami kendala pengiriman karena berbagai aspek, seperti keadaan alam, transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kenaikan harga komoditas.

#### **Rantai Pasokan yang Panjang**

Rantai pasokan (*supply chain*) sangat berpengaruh terhadap distribusi komoditas, hal ini bisa dilihat dari bagaimana perjalanan komoditas dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen.

Terkadang rantai pasokan ini menjadi lebih panjang karena banyak terlibat dalam hal distribusi produk, hal ini tentu secara tak langsung dapat mengakibatkan kenaikan harga komoditas secara signifikan.

#### **Adanya Kartel!**

Tidak usah ditutup-tutupi lagi, pangan adalah sasaran empuk yang cukup sering 'dimainkan' pelaku bisnis. Kenapa demikian? Sebagai negara agraris, pangan adalah sumber kehidupan yang tak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Berapapun harganya, jika sudah menyangkut soal urusan dapur, berapapun akan dibayar. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku-pelaku bisnis tadi.

Diperparah lagi adanya perilaku bisnis dengan cara menimbun. Tujuannya jelas, agar terjadi kelangkaan (*scarcity*) di pasar, sehingga akan terjadi pergolakan dan pada akhirnya harga merangkak naik.

Penimbunan ini dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan dari selisih harga beli ketika komoditas melimpah dengan harga jual ketika sudah terjadi kelangkaan. Hal ini sering terjadi menjelang momen hari raya.

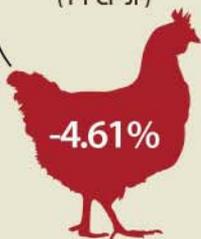
#### **Perilaku Masyarakat**

Perilaku masyarakat yang tinggi – bahkan bisa bergeser menjadi paranoid – membuat harga pangan ikut terpengaruh. Perilaku ini misalnya memborong komoditas pangan untuk persiapan (stok) persediaan bahan baku makanan.

Perilaku tersebut dilihat pada saat mengawali bulan Ramadhan. Masyarakat kita ini menghadirkan sajian yang berbeda dengan hari biasanya. Pada tataran tertentu, hal ini masih bisa dipahami sebagai motivasi dalam menjalankan ibadah puasa. Begitu juga ketika lebaran tiba, hidangan yang disajikan juga harus lebih mewah dibandingkan ketika puasa. Hal ini pastinya akan memberikan pengaruh terhadap komoditas pangan di pasar. (*Redaksi – dari berbagai sumber*) □

# PERBANDINGAN PRODUKSI DOC FS 2015 DENGAN 2014

PT. Charoen Pokphand  
(PT CP JF)



PT. Japfa Comfeed Indonesia



PT. Malindo Indonesia  
(PT. Bibit Indonesia)



PT. CJ PIA  
(PT. Super Unggas Jaya)



PT. Taat Indah Bersinar  
(PT. PIA)



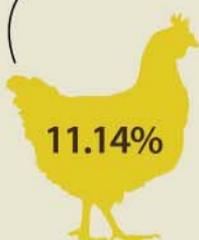
PT. Hybro Indonesia  
(PT. Ayam Manggis)



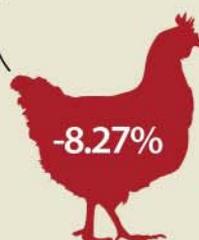
PT. Cibadak Indah  
Sari Farm



CV. Missouri



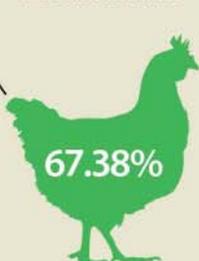
PT. Ekspravet Nasuba



PT. Reza Perkasa



PT. Satwa Borneo



PT. Wonokoyo Jaya



KETERANGAN :



MENURUN

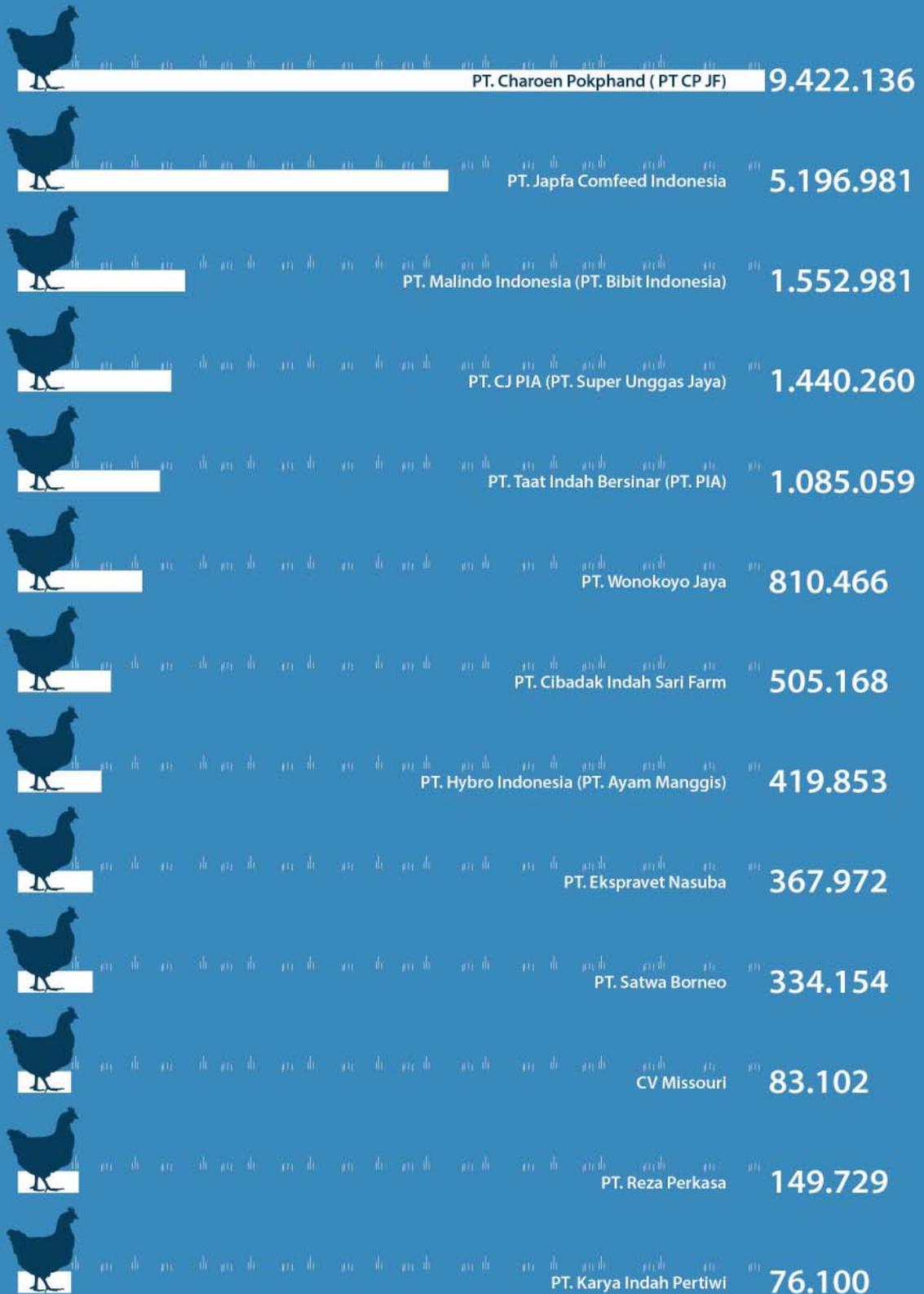


STABIL



MENINGKAT

# FAKTA PORSENTASE GPS DI INDONESIA



**Total**

**21.443.947**



KEPALA KPD MAKASSAR  
**RAMLI SIMANJUNTAK**

*Amanat UU persaingan sangatlah mulia bagi KPPU, yakni menciptakan persaingan sehat di dunia bisnis. Ke depan, tantangan di dunia bisnis akan semakin besar. Perilaku bisnis yang mengarah ke kartel akan semakin beragam. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus segera diselesaikan. Jaringan komunikasi juga harus dibangun dengan lebih baik lagi. Dirgahayu KPPU ke-16!*



KEPALA KPD BALIKPAPAN  
**AHMAD MUHARI**

*Ibarat manusia, usia ke-16 adalah usia remaja. Suatu masa yang penuh energi, penuh semangat dan belajar mengambil keputusan. Tentunya, dengan segenap semangat dan dukungan dari semua pihak, KPPU harus berlari semakin kencang untuk mereformasi pasar demi terwujudnya Indonesia makmur bebas kartel!.*



KEPALA KPD SURABAYA  
**ARU ARMANDO**

*Sebagai lembaga independen, keberadaan lembaga ini harus senantiasa berpihak, yaitu berpihak kepada kepentingan kemakmuran rakyat Indonesia. KPPU ada karena ada untuk rakyat Indonesia. Di masa mendatang, KPPU harus tetap konsisten dalam upaya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.*

KEPALA KPD BATAM  
**LUKMAN SUNGKAR**



*Sebuah proses penegakan hukum tidak pernah berada di ruang hampa. Ada sebuah taktik, strategi dan etika dalam mewujudkannya. Penegakan hukum di daerah sangatlah berbeda dengan di pusat. Sudah waktunya KPPU mendorong semua KPD untuk gencar melakukan penegakan hukum. Integritas dan profesionalitas kantor KPD juga harus didorong ke arah yang lebih baik. Dengan SDM yang berkualitas, maka integritas dan loyalitas pasti akan terwujud!*

KEPALA KPD MEDAN  
**ABDUL HAKIM PASARIBU**



*Sekarang ini KPPU harus memperbaiki komunikasi dengan lembaga lain. Komunikasi yang tidak menimbulkan anggapan bahwa KPPU ini superior, mau menangnya sendiri. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.*

# MAKIN CINTA & BANGGA

BEKERJA DI KPPU INI MEMBANGGAKAN. WALAUPUN SITUASI KELEMBAGAAN NAIK TURUN, NAMUN SAYA JUSTRU MAKIN CINTA UNTUK MENGABDI DI KPPU.

• ANDI SOFYAN, KOORDINATOR SATUAN PENGAMANAN KPPU

**N**ama saya Andi Sofyan. Saya biasa dipanggil Sopian. Saya bekerja sebagai koordinator satuan pengamanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Staf pengamanan di kantor ini jumlah ada 30 orang. Tugas satuan pengamanan adalah memastikan semua kondisi di kantor aman dan proses sidang berjalan aman. Kami juga memastikan semua orang yang ada di lingkungan KPPU dari mulai lantai bawah sampai atas dalam kondisi aman.

Ketika pertama bekerja disini, saya sama sekali tidak mengetahui apa itu KPPU. Saya hanya tahu KPU, yang mengurus pemilu. Saya dulu kira KPPU ini statusnya pegawai negeri, ternyata bukan. KPPU itu ternyata lembaga negara seperti KPK. Ternyata justru ini yang membanggakan. Saya bekerja di lembaga independen yang mengawasi pelaku usaha.

Kenapa saya bangga bekerja di KPPU? Suasana kekeluargaan saya peroleh di lembaga ini. Meskipun memang dari mulai saya pertama bergabung sampai sekarang selalu ada ketidakpastian kelembagaan. Setiap kali ada pergantian pimpinan, selalu saja ada keresahan. Bagaimana nasib kami-kami ini?

Hal yang agak tegang selama bekerja di KPPU itu sewaktu sidang perkara ban. Waktu itu puluhan kuasa hukum dari pihak terlapor cukup keras dalam pembelaannya. Sampai saya mengerahkan banyak sekali satuan keamanan untuk memastikan sidang berjalan dengan lancar.

Dalam beberap waktu terakhir saya dengar beberapa lembaga pemerintahan akan dibubarkan. Saya sendiri jelas tidak setuju jika lembaga seperti KPPU ini juga ikut dibubarkan. Khan, kalau korupsi yang mengurusin KPK. Kalau kejahatan bisnis, siapa lagi kalau bukan KPPU? Ini yang seharusnya dipikir ulang pemerintah, apa benar lembaga sepenting KPPU ini akan dibubarkan.

Saya sangat mengapresiasi segenap pimpinan yang berhasil memberikan perubahan kelembagaan di pertengahan tahun ini. Tunjangan secara ekonomi yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Ini tentunya perubahan positif.

Bekerja di Jl. Juanda 36 itu jadi kebanggaan sendiri. Saya sendiri sering berkelakar jika ditanya teman dimana saya bekerja. Saya jawab, saya kerja di Ring Satu, di lingkungan istana negara. □



## ALDILA AWALUDIN, PRAMUSAJI PIMPINAN KPPU

**N**ama saya Aldila Awaludin, panggilan saya Dila. Saya asli Betawi, Jakarta. Saya bekerja di KPPU semenjak 2008 sampai sekarang. Sebelum bekerja di KPPU, saya bekerja di tetangga KPPU, yaitu KPK. Waktu itu KPK masih berkantor di Jl. Juanda, kantor seberang persis KPPU.

Awalnya saya sebagai *cleaning service* (CS) di KPK, selama 2 tahun dari 2006. Setelah selesai kontrak, KPPU buka lowongan CS, akhirnya saya melamar KPPU dan diterima.



Kerja di KPPU ini antara enak nggak enak. Karena saya melayani banyak orang disini. Kalau teman-teman staf pada datang sebelum jam 8 pagi, saya diwajibkan jam 6 pagi udah tiba di kantor. Pulang pun demikian, tidak bisa pulang lebih cepat. Jadi berangkat paling pagi, pulang paling belakangan.

Dulu sewaktu ada penangkapan pimpinan KPPU oleh KPK, itu rasanya nyesek. Gimana tidak, saya pernah kerja di KPK, lalu pindah KPPU, lalu pimpinan saya ditangkap KPK.

Selain itu, kerja di KPPU itu tidak boleh sembarangan ngomong, karena harus menjaga rahasia. Sering kali saat bersih-bersih itu lihat dokumen, tapi saya, ya, harus tutup mata. Apapun yang saya tahu soal KPPU, harus saya jaga. KPPU itu sudah jadi bagian keluarga saya.

Dari 2008 saya bekerja di KPPU, ingin sekali dapat kepastian kontrak. Dulu, pertama bekerja kontrak langsung dari KPPU. Tapi sekarang saya jadi tenaga *outsourcer*. Tiap tahun kontrak diperpanjang, itupun dengan ketidakpastian.

Jika pimpinan ada program beasiswa untuk orang-orang seperti saya ini, saya sangat tertarik. Dulu juga sempat kuliah. Tapi karena berubah jadi tenaga *outsourcer*, kuliah saya berhenti di tengah jalan. Saya sangat berharap perhatian pimpinan di dalam hal kesejahteraan.

Sempat juga muncul perasaan ingin pindah kerja. Tapi bagaimanapun saya hanya lulusan SMA. Mau kerja dimana lagi? Walaupun sekarang disini sebagai pelayan, tetap dapat penghargaan. Bisa lihat banyak orang-orang besar, teman-teman di kantor juga baik, sudah seperti keluarga. □





SALING SAPA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie sesaat bertemu Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, sebelum mengikuti Malam Syukuran 16 Tahun di gedung KPPU, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

# HOLDING BUMN KEUANGAN

Pengelolaan BUMN selalu menarik pemberitaan hangat. Dalam beberapa bulan belakangan, isu terkait sinergi antar BUMN, penunjukan BUMN untuk mengelola proyek strategis sampai pada penugasan BUMN dalam kaitan stabilisasi pasar untuk komoditi pangan cukup mendominasi pemberitaan di media massa. Dalam momen ini, pemberitaan holding BUMN keuangan pun juga beberapa kali masuk dalam pemberitaan.

**K**husus untuk pengelolaan BUMN keuangan, memang membutuhkan perhatian khusus, karena 4 bank BUMN nilai kapitalisasi pasarnya mencapai nilai estimasi kurang lebih 2 ribu triliun. Konsolidasi keempat bank BUMN ini secara nilai pasar akan langsung menempatkan holding tersebut di jajaran beberapa bank besar ASEAN seperti UOB Singapura. Walau dari sisi fundamental mungkin perbandingannya berbeda, namun, fakta kapitalisasi pasar yang substansial tersebut mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja bank bank besar di Indonesia yang pada umumnya positif.

Rencana konsolidasi BUMN keuangan yang mengemuka rasanya sudah mendekati final namun justru masih membuka lubang besar terkait bentuk holding nantinya. Seolah ada dua opsi yaitu opsi pertama dimana pemegang saham (pemerintah) menunjuk BUMN investasi untuk menjadi holding bank BUMN. Opsi kedua menunjuk salah satu bank BUMN menjadi leader holding BUMN. Kenapa muncul opsi pertama? Karena wacana merger

antar bank BUMN itu cenderung *unfavorable*, mengacu pada isu merger mandiri dengan BNI tempo hari.

Dengan kata lain karena ego institusional masing-masing, mungkin menunjuk satu BUMN non perbankan untuk menjadi holding akan menjadi opsi yang paling *feasible* bagi pemerintah. Namun, pengelolaan holding oleh BUMN non perbankan juga tetap memiliki potensi konflik, sejauh mana masing-masing bank BUMN “rela” untuk diatur oleh pimpinan holding yang selama ini belum memiliki “jam terbang cukup” di sektor perbankan. Dengan demikian, penempatan SDM di pucuk holding bumn keuangan sangat strategis, dan harus tokoh yang diterima oleh stakeholder industri perbankan.

Juga perlu diperhatikan adanya faktor kultural dan kohesifitas antara asset, termasuk SDM adalah faktor yang menentukan keberhasilan strategi konsolidasi. Merger dua perusahaan otomotif dunia (Daimler Chrysler) menjadi pembelajaran bahwa sinergi kultural dan budaya kerja antar perusahaan yang berbeda



## OLEH TAUFIK ARIYANTO

Penulis adalah Direktur di Direktorat Merger Komisi Pengawas Persaingan Usaha

bukan sebuah proses yang ringan. Beberapa analisa cenderung menyimpulkan bahwa kasus Daimler Chrysler menunjukkan bahwa budaya korporasi di Amerika berbeda dengan budaya korporasi di Jerman, dan mereka sulit dibersatukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain faktor budaya kerja, faktor sinergi juga harus menjadi pertimbangan utama. Sinergi sering disebut sebagai *holy grailnya* merger akuisisi, objek yang diketahui dan dapat diprediksi namun sulit untuk dicapai. Pendek kata, sinergi akan terjadi kalau perusahaan yang terkonsolidasi memiliki asset dan kapasitas yang saling mengisi baik untuk ekspansi pasar atau untuk melakukan efisiensi operasional.

*Profiling* ringkas dari keempat bank BUMN kita menggambarkan posisi yang sama dalam hal segmen pasar, nasabah, segmen produk dan jasa. Sederhananya, keempat bank BUMN beroperasi di ceruk pasar yang sama dengan mengadakan produk dan jasa yang sama. Dalam hal ini, realisasi sinergi untuk ekspansi pasar atau efisiensi operasional akan sulit. Bagaimana mau ekspansi kalau ternyata korporasi maupun individual nasabah sudah menjadi pelanggan di antara keempat bank tersebut. Bagaimana mau efisien kalau dalam satu kompleks ruko ada kantor cabang dari keempat bank tersebut.

Dari kacamata keuangan korporasi, untuk mencapai target sinergi, holding BUMN harus menetapkan segmen berbeda untuk keempat bank tersebut untuk mengurangi irisan sales dan pemasaran yang tidak produktif. Pengurangan asset yang non-produktif juga harus ditemui, termasuk rasionalisasi SDM karena kalau jumlah kantor cabang dikurang otomatis SDM juga akan berlebih nantinya. Selain itu, efisiensi operasional dalam rangka jaringan pembayaran menuntut MIS dan tentunya akan mengurangi kebutuhan untuk operasional kantor cabang. Mungkin ada beberapa kebijakan strategis namun

tidak populis yang harus diambil namun ini menjadi konsekuensi dari target sinergi sendiri yang tidak dapat dihindari.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dampak terhadap iklim persaingan di pasar produk dan jasa keuangan. Holding keuangan BUMN tentunya dapat mempengaruhi iklim persaingan di produk dan jasa keuangan, khususnya dana pihak ketiga, kredit serta bentuk bentuk jasa keuangan yang sudah eksis di pasar. Dari yang tadinya bersaing, kini akan terjadi pengaturan oleh holding, dimana unit BUMN keuangan akan berkoordinasi untuk melakukan penawaran produk dan jasa keuangan yang dimaksud.

Secara hipotetis, holding BUMN keuangan dapat membentuk pengelola sistem pembayaran elektronik (*switching company*) yang bersifat eksklusif, sehingga menyulitkan bank non BUMN untuk terintegrasi dalam sistem tersebut. Contoh lain, holding BUMN keuangan dapat membentuk konsorsium untuk kredit mega proyek yang mungkin sulit untuk disaingi oleh bank kompetitor, kecuali oleh bank asing.

*Holding* juga dapat menentukan variasi dan differensiasi produk dan jasa (perbankan dan non perbankan) yang akan ditawarkan oleh BUMN keuangan kepada klien korporasi utama. Dengan variasi lini produk dan jasa yang ditawarkan, akan menjadi sulit bagi bank non BUMN untuk bersaing.

Bagi nasabah atau klien, kondisi yang disebut sebagai *consumer locked in* dapat terjadi, dimana susah untuk bagi nasabah utk beralih ke bank lain. Pendek kata, operasional holding BUMN keuangan dapat memiliki ketersinggungan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Sejauh mana pengaturan oleh holding tersebut akan menjadi isu krusial terkait hukum persaingan usaha, tentunya hal ini akan menjadi unit pengawasan oleh KPPU dalam waktu yang akan datang. □

# MENGENALKAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT SEJAK DINI\*

**S**alah satu strategi untuk menginternalisasikan nilai atau prinsip persaingan usaha sehat tersebut adalah melalui jalur pendidikan.

Syahkan di sebuah pasar di pinggir kota terjadi peristiwa sebagai berikut: Seorang ibu rumah tangga sedang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Hari itu, si ibu berencana untuk memasak sayur asam dengan tempe sebagai lauknya. Setelah mendapatkan bahan memasak sayur asam, kini tiba saatnya membeli tempe. Uang belanja tersisa di kantong si ibu ada Rp12.000,- cukuplah untuk membeli tempe buat lauk keluarganya. Setelah berkeliling pasar, ia menemukan kios penjual tempe yang terlihat ramai.

Yang ia tahu, harga pasar sekotak tempe berkisar Rp5.000,- sampai Rp6.000,-. Dengan perkiraan itu, si ibu berencana membeli dua kotak untuk kebutuhan keluarga kecilnya. Dan betapa terkejutnya ia dengan harga yang dibuka oleh si penjual tempe, Rp.8.000,- yang dibanderol per-kotak harga yang dibuka jauh dari perkiraannya. Dengan gigih si ibu ngotot menawar, namun si penjual bergeming. Karena tidak turun sedikitpun, Selanjutnya, si ibu mencari kios tempe yang lain, berharap mendapatkan harga yang lebih murah.

Sayang, setelah mengitari pasar, ia tidak menemukan satu pun kios tempe. Setelah bertanya ke beberapa pedagang di pasar, baru ia tahu jika kios tempe yang ia

tinggalkan sebelumnya adalah satu-satunya kios yang menjual tempe. Mau tidak mau, dengan perasaan kesal ia kembali ke kios tempe tadi dan hanya mendapatkan satu kotak tempe, dengan harga Rp8.000,- tanpa bisa ditawar. Usut punya usut, penjual tempe itu menjadi satu-satunya penjual tempe di pasar itu dengan cara licik. Bersama preman setempat, ia mengusir dan melarang orang lain berjualan tempe di pasar tersebut.

## Konsep Persaingan Sederhana

Peristiwa si ibu dan penjual tempe merupakan contoh sederhana betapa persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan kerugian untuk banyak pihak. Paling tidak, yang dirugikan dari ilustrasi cerita di atas adalah, para pedagang tempe yang tidak bisa berjualan karena dihalangi dan juga si ibu dan konsumen lain. Konsumen tidak punya posisi tawar yang baik karena penjual tempe tadi adalah satu-satunya penjual yang berada di pasar. Walhasil, penjual tempe tadi dapat menjual tempe dengan harga semau-maunya.

Ilustrasi cerita tersebut adalah gambaran sederhana praktik monopoli yang dilakukan oleh monopolis (penjual tempe) kepada konsumennya. Dengan *market power* (kekuatan pasar) yang didapatkan dengan cara tidak benar, yakni menghalangi pesaingnya untuk berusaha di pasar bersangkutan, ia mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menjual harga secara eksesif (*excessive price*).



## OLEH ARU ARMANDO

Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Surabaya

Pertanyaannya, bagaimana jika ilustrasi diatas dilakukan pada sebuah industri dengan skala besar, yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas? Tentu tingkat kerugiannya menjadi luar biasa.

Perilaku pelaku usaha yang menghalalkan segala cara dengan mengabaikan prinsip persaingan usaha tidak sehat ini sama jahatnya dengan praktik suap dan korupsi yang marak akhir-akhir ini. Ujung-ujungnya, masyarakat luas adalah korban dari baik praktik seperti ini. Untuk praktik suap dan korupsi, kiprah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak perlu diragukan, sekian banyak operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap para koruptor adalah konsumsi publik yang disiarkan luas oleh media massa.

Bagaimana dengan kiprah lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)? Apakah masyarakat mengikuti kiprah lembaga yang punya kisah sukses di industri penerbangan dan telekomunikasi serta di sektor industri lainnya?

Salah satu hasil konkret kerja KPPU adalah saat ini bepergian dengan menggunakan pesawat sudah bukan menjadi hal yang mustahil bagi masyarakat kebanyakan serta banyak lagi yang lainnya.

Bisa jadi, masyarakat merasakan terjangkaunya produk yang ada dalam pasar serta kemudahan dalam berusaha namun tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut adalah hasil atau proses yang dilakukan oleh lembaga yang bernama KPPU.

Menurut penulis, hal tersebut wajar mengingat begitu kompleks dan asingnya istilah-istilah yang digunakan dalam hukum persaingan usaha untuk telinga awam. Istilah suap, korupsi, relatif lebih familiar dibandingkan dengan istilah yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha seperti:

monopoli, oligopoli, kartel, trust, merger, akuisisi, dan sebagainya.

### Strategi Internalisasi

Prinsip persaingan usaha sehat sangat strategis. Karena itu, upaya menginternalisasikannya ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari harus dilakukan dengan sepenuh hati. Salah satu strategi untuk menginternalisasikan nilai atau prinsip persaingan usaha sehat tersebut adalah melalui jalur pendidikan. Harus mulai dipikirkan upaya memasukkan kurikulum persaingan usaha dalam sistem pendidikan. Para pihak terkait, perlu duduk bersama merumuskan bagaimana nantinya prinsip persaingan usaha sehat dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan.

Menurut penulis, prinsip persaingan usaha sehat harus dikenalkan sejak dini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih peka dan sensitif jika terjadi pelanggaran atas prinsip persaingan usaha di sekitarnya. Tentu, jika masyarakat peka akan prinsip persaingan usaha sehat, maka masyarakat akan menjadi ujung tombak yang efektif dalam upaya memerangi praktik persaingan usaha tidak sehat.

Pertanyaannya, sejak kapan? Atau sedini apa dikenalkan? Apakah sejak masa pra sekolah, dengan cara mengenalkannya melalui permainan yang mengandung unsur pengenalan prinsip persaingan usaha sehat, atau pada masa sekolah dengan menyesuaikan rentang atau jenjang pendidikannya.

Penulis lebih condong memilih pengenalan prinsip persaingan usaha sehat dilakukan sejak masa pra sekolah, dengan cara memasukkan prinsip persaingan sehat melalui permainan yang sederhana tapi menarik. Baru setelah itu memasukkan prinsip persaingan usaha melalui kurikulum pendidikan, dengan catatan, disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari peserta didik.[]

\*Pernah dimuat di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)



**KPPU HUKUM 32 FEEDLOTER**

# ASOSIASI ‘NAKAL’ HARUS DITINDAK

**R**esmi, KPPU akhirnya memutuskan 32 perusahaan penggemukan sapi (*feedloter*) terbukti bersekongkol melakukan praktik kartel. 32 perusahaan ini terbukti bersepakat melakukan kartel melalui Asosiasi Produsen Daging dan *Feedlot* Indonesia (Apfindo).

Dipimpin Chandra Setiawan sebagai Ketua Majelis dan beranggotakan Sukarmi, Saidah Sakwan, Munrokhim Misanam dan Tresna P. Soemardi, KPPU menjatuhkan denda pada terlapor dengan kisaran denda terendah sebesar Rp 194 juta, dan denda tertinggi sebesar Rp 21 miliar.

“Dengan ini majelis komisi memutuskan bahwa terlapor

**“Dengan ini majelis komisi memutuskan bahwa terlapor 1 sampai terlapor 32 terbukti melanggar pasal 11 dan pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat,”**

**Chandra Setiawan**

1 sampai terlapor 32 terbukti melanggar pasal 11 dan pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat,” papar Chandra dalam saat memimpin sidang pembacaan putusan di gedung KPPU, Jakarta, Jum’at, 22 April 2016.

Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan yang tergabung di Apfindo sengaja menahan pasokan sapi agar pemerintah molonggarkan kebijakan kuota sapi yang diimpor yang dibatasi hanya 50 ribu ekor pada triwulan III 2015. Hal ini membuat harga daging sapi di Jabodetabek sempat menembus di atas Rp 170.000/kg. □



## LG TELAT LAPOR

# TAK MAU KENA DENDA, SEGERA LAPORKAN MERGER

**K**PPU menjatuhkan hukuman denda 8 miliar kepada LG International Corp. Pabrik elektronik asal Korea Selatan ini telat melaporkan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi. “Denda ini harus disetor ke negara sebagai setoran denda persaingan usaha,” ujar Ketua Majelis Hakim Kamser Lumbanraja membacakan putusan ini di Gedung KPPU, Rabu, 27 April 2016. Selain Kamser, perkara dengan nomor register 16/KPPU-M/2015 ini diselidiki oleh Anggota Majelis yang lain, yakni Sukarmi dan Chandra Setiawan.

Nilai aset dan nilai penjualan pengambilalihan saham PT. Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp. telah memenuhi batasan nilai yaitu

**“Denda ini harus disetor ke negara sebagai setoran denda persaingan usaha,”**

### Kamser Lumbanraja

aset gabungan sebesar Rp 3.826.916.343.127 (tiga triliun delapan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp 5.315.794.952.347 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus

lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham telah memenuhi batasan (threshold) nilai penjualan (omzet) dan aset minimal dilakukannya penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) PP No. 57/2010 yang menyatakan bahwa suatu transaksi akuisisi akan diadakan Penilaian apabila: (a) aset gabungan dari transaksi ini melebihi Rp 2,5 triliun rupiah dan (b) omzet gabungan melebihi Rp 5 triliun.

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan yang dilakukan oleh investigator, LG International Corp. terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Binsar Natorang Energi selama 20 hari kerja. □



KPPU KELUARKAN REKOMENDASI UNTUK WALIKOTA BANDUNG

# KPPU BATALKAN LELANG PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

**S**eolah setiap lini birokrasi di negeri ini jadi ajang bancakan untuk meraup untung. Demikian juga dengan yang terjadi dalam lelang umum pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) di Kota Bandung.

Terbukti dengan sah dan meyakinkan terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal, yakni antara Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha, Walikota Bandung Periode 2003-2013 Dada Rosada, PT. Bandung Raya Indah Lestari dan PD. Kebersihan Kota Bandung.

Putusan berupa rekomendasi ini dibacakan di gedung KPPU pada Jum'at, (26/06/2016) dengan Ketua Majelis Munrokhim Misanam dan beranggotakan R.

Kurnia Sya'ranie dan Kamser Lumbanradja.

Pengadaan pembangkit listrik tenaga sampah ini berawal pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung periode 2008-2013, Dada Rosada yang sekarang mendekam di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin setelah dinyatakan bersalah dalam kasus suap hakim terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial Kota Bandung di masa kepemimpinannya.

**Dalam proses lelangnya, ternyata PT BRIL adalah peserta titipan yang sedari awal tidak mengikuti lelang bersama peserta yang lain.**

Dalam proses lelangnya, Pemerintah Kota Bandung mengunci pilihan teknologi untuk mengolah sampah menjadi

energi listrik pada pembakaran sampah yang diajukan oleh satu dari tiga peserta lelang, yakni PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL). Perusahaan asal Bandung ini membawa teknologi Hangzhou Boiler Group asal Tiongkok.

Ternyata, Pemerintah Kota Bandung malah menandatangani nota kesepahaman tentang rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan PT BRIL pada tanggal 21 September 2005.

Dada Rosada lantas menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bandung No: 658.1/kep.010-BAPPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa dan Pemberian Kompensasi Dalam Rangka Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur PSBTRL (pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan) melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha pada tanggal 3 Januari 2012.[]



## NAFAS LEGA PETANI SAWIT

**K**PPU menyambut baik dengan pembubaran Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) yang terdiri dari enam perusahaan. Menurut Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, sudah seharusnya ISPO dikuatkan lagi. Adapun kekurangan di dalam ISPO sedikit-demi sedikit harus terus dibenahi guna pembuktian bahwa kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan perkebunan yang *sustainable* baik di hulu maupun hilir.

Dari kacamata KPPU, terdapat perbedaan yang signifikan antara kesepakatan IPOP dengan kebijakan Pemerintah (ISPO), yakni penetapan standar kriteria lingkungan yang baik untuk perkebunan sawit. ISPO menggunakan standar kriteria High Conservation Value Forest (HCVF), sementara para anggota IPOP sepakat untuk menambahkan kriteria High Carbon Stock (HCS). Hal ini membuka potensi terjadinya hambatan masuk pasar bagi mitra anggota IPOP yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, namun tidak memenuhi standar kriteria HCS.

**Kesepakatan IPOP juga memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan regulasi pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha.**

Di samping itu, pelaku usaha yang tergabung dalam IPOP menguasai pangsa pasar CPO yang cukup besar, sehingga para anggota IPOP memiliki kekuatan pasar yang cukup besar pula. Kesepakatan IPOP juga memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan regulasi pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha. Maka, IPOP berpotensi menjadi sarana kartel untuk menjadi hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha mitra anggota IPOP. □



## PASTIKAN HARGA DAGING SAPI NORMAL, KETUA KPPU KEMBALI SIDAK RPH

Untuk menjawab kegelisahan masyarakat akibat naiknya harga daging sapi, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Semanan, Jakarta Barat, Rabu (8/6/2016). Selama satu jam, ia melakukan tanya jawab dengan pengelola dan para pegawai RPH.

Saat melakukan sidak, Syarkawi mencoba mencari tahu apa yang membedakan antara sapi import dari Australia dengan sapi lokal yang ada di RPH. Ia juga menanyakan kenapa harga

**“Jadi, bisa atau tidak, Pak, harga daging sapi ini diturunkan jadi di bawah 100 ribu?”**

**Syarkawi Rauf**  
Ketua KPPU

daging sapi yang dipatok dan dijual ke masyarakat tidak bisa diturunkan hingga 80 ribu, padahal Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas dalam memberikan instruksi.

“Jadi, bisa atau tidak, Pak, harga daging sapi ini diturunkan jadi di

bawah 100 ribu?” tanya Syarkawi kepada pemilik RPH Bina Karya, Almunir Mochtar.

“Bisa pak. Cara agar harga di bawah 100 ribu, kalau harga di *feedlotter* (tempat penggemukan sapi) harganya bisa 40 ribu. Sehingga bisa dijual 85 ribu di pasar,” jawab Almunir.

Menurut Almunir, pihaknya mampu memenuhi 10 persen kebutuhan sapi untuk wilayah Jakarta Barat jika mereka memotong 20 ekor sapi setiap harinya. Menjelang Idul Fitri, sapi yang dipotong bisa mencapai 300 ekor sampai 500 ekor per harinya.[]



## IMPOR BUKANLAH JALAN KELUAR

**K**etua KPPU M. Syarkawi Rauf meminta pemerintah agar tidak mengimpor bawang merah meski harga di pasaran cenderung naik. Syarkawi memastikan produksi nasional masih surplus dan tidak ditemukan praktek penimbunan dari kenaikan harga.

**Oleh karena itu, KPPU akan meminta pemerintah untuk tidak melakukan impor bawang merah hanya karena melihat tren kenaikan bawang merah saat ini.**

Hal ini disampaikan ketika Syarkawi bersama tim investigator KPPU memeriksa langsung ketersediaan bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sentra komoditas bawang, Senin (9/6).

Di lapang ditemukan fakta bahwa harga bawang merah di tingkat pedagang memang sudah

tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya produksi petani akibat belum memasuki usia panen. Di Nganjuk sendiri, panen bawang merah akan dimulai satu sampai dua bulan mendatang. Pada akhirnya, para pedagang di pasar Nganjuk terpaksa mendatangkan bawang merah dari Sulawesi dan Bima yang lebih dulu panen.

Para pedagang di Nganjuk mendatangkan bawang merah dari luar Jawa dengan harga di kisaran Rp 27 ribu/kilogram belum ditambah dengan biaya angkut Rp 15 ribu per kilonya. Selanjutnya, mereka menjualnya ke tingkat eceran sebesar Rp 30 ribu - 31 ribu perkilonya. Untung yang diambil tak lebih dari Rp 1.500 - 2500. Jika dibawa ke luar kota, semisal ke Surabaya atau Jakarta, harganya berlipat menjadi Rp 40 ribu perkilonya.

Sayangnya, hal ini berbanding terbalik ketika musim panen bawang tiba. Di Nganjuk, ketika musim panen tiba, harga bawang terjun bebas menjadi Rp 10 perkilonya akibat banyaknya pasokan dari para petani.

“Jika manajemen panen bagus,

disparitas yang terlalu jauh ini seharusnya tidak terjadi,” ujar Syarkawi.

Kondisi ini berbanding terbalik ketika musim panen terjadi di Nganjuk. Harga komoditas ini bisa jauh lebih murah menjadi Rp 10 per kilogram akibat banyaknya pasokan dari petani. “Disparitas yang terlalu jauh ini seharusnya tidak terjadi jika manajemen panen mereka bagus,” kata Syarkawi.

Menjelang lebaran seperti sekarang ini, menurut Syarkawi, banyak terdapat pedagang besar yang memainkan harga bawang. Sebenarnya, naik turunnya harga bawang tidak menunjukkan kurangnya produksi nasional. Dalam lima tahun terakhir, produksi Indonesia bahkan surplus dengan produksi 1,2 juta ton di tahun 2014-2015 dan 1,1 juta ton pada 2015-2016. Sedangkan kebutuhan konsumsi sebesar 975 ribu ton per tahun.

Sebab, kondisi ini akan berubah lagi pada 1-2 bulan ke depan memasuki musim panen di sentra Kabupaten Nganjuk.[]



## AGAR LEBARAN LEBIH NYAMAN

**A**kibat tata kelola komoditas pangan yang masih dicurangi pelaku usaha “nakal”, masih saja hari besar keagamaan dijadikan ajang mendulang rupiah. Harapan merayakan kebersamaan menjadi terganggu, akibat maraknya pedagang besar yang menaikkan harga komoditas pangan.

Berdasarkan situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Minggu, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan yang cukup besar yakni Rp2.413 menjadi Rp32.761 per kilogram, diikuti cabai rawit merah Rp2.141 menjadi Rp37.071 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp1.276 menjadi Rp26.880 per kilogram. Berangkat dari kegelisahan ini, KPPU mengundang 9 asosiasi pangan dalam FGD yang digelar di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (10/5).

Sembilan asosiasi yang mengikuti FGD ini adalah AGI (Asosiasi Gula Indonesia),

**“Bawang merah itu setiap tahun bisa sampai ratusan ribu ton. Tapi justru terjadi kelangkaan. Ini menunjukkan ada manajemen yang salah yang harus kita selesaikan,”**

**Syarkawi Rauf**  
Ketua KPPU

ABMI (Asosiasi Bawang Merah Indonesia), Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia), KOPTI (Koperasi Tahu Tempe Indonesia), APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia), AACI (Asosiasi Agrobisnis Cabai Indonesia), GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Perunggasan), ASI

(Asosiasi Semen Indonesia) dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia).

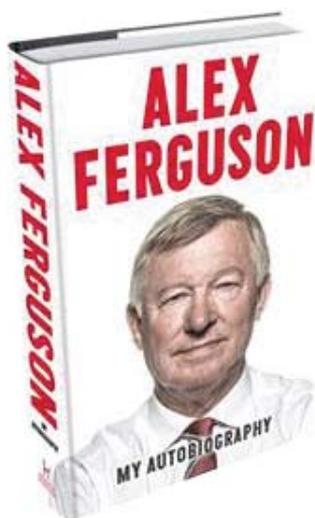
“Bawang merah itu setiap tahun bisa sampai ratusan ribu ton. Tapi justru terjadi kelangkaan. Ini menunjukkan ada manajemen yang salah yang harus kita selesaikan,” ujar Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf.

Selanjutnya FGD ini menghasilkan sebuah fakta integritas dimana setiap asosiasi akan bersatu padu ikut memantau pergerakan harga pangan di pasaran. Dua point yang disepakati antara KPPU dengan 9 asosiasi ini adalah melakukan internalisasi prinsip-prinsip persiangan usaha yang sehat, terutama dalam lingkup organisasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Lalu kedua, tidak melakukan atau memfasilitasi segala bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek bisnis tidak sehat. □



**ARE YOU???**

# KARENA BERSAING ITU MENYENANGKAN



## Judul Buku

Alex Ferguson, Autobiografi Saya

## Penulis

Sir Alex Ferguson

## Alih Bahasa

Zia Anshor

## Penerbit

Gramedia Pustaka Utama

## Bahasa

Indonesia

## Tebal

397 halaman

## Tahun terbit

2014

Bersaing, berkompetisi adalah hal yang biasa dilakukan pelatih bola dimanapun, termasuk Sir Alex Ferguson, mantan manajer klub sepakbola Manchester United. Bersama Manchester United sejak 1986, ia mempersembahkan 38 gelar juara, termasuk Piala Dunia Klub, 2 kali juara Liga Champions, 13 kali juara Liga Premier, dan 5 Piala FA. Dengan 49 gelar juara yang diraihnya, dia menjadi manajer sepak bola Britania paling sukses sepanjang masa.

27 tahun kejayaan Manchester United tak lepas dari visi, energi, dan keahlian Sir Alex yang dapat menjaga kualitas timnya dan kelangsungan keberhasilan dari klub ini. Termasuk menjadi treble winner pada 1999.

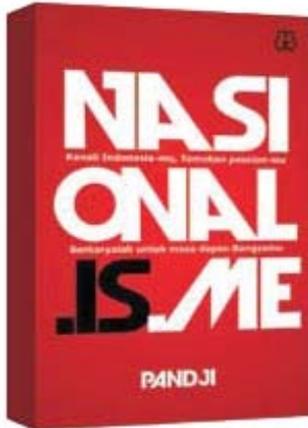
Sir Alex, seorang manajer dengan skill yang fenomenal dan seringkali harus berhadapan dengan pemain-pemain bintang seperti Roy Keane, Eric Cantona, dan Ruud van Nistelrooy. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo dan David Beckham yang mendeskripsikan Sir Alex sebagai sosok ayah dalam hidup mereka.

Sir Alex juga menceritakan persaingan sengitnya dengan klub papan atas Liga Premier Inggris lain dan menceritakan hubungannya dengan para rival yang mungkin tidak pernah kita lihat di atas lapangan hijau.

Meski banyak yang menjuluki Fergie dengan sebutan Opa, karena usianya yang sudah tua dan masih saja bandel melatih, ia tetap mampu bersaing dengan jajaran pelatih muda di tanah Inggris. Setelah mengantar Manchester United menjadi juara Liga Champions pada malam dramatis di Moskwa pada 2008 dan berhasil membawa pulang kembali Piala Liga Premier pada musim 2012-2013, Sir Alex memutuskan untuk pensiun dari jabatan manajernya.

Ferguson pernah berkata, '*saya terlalu tua untuk pensiun. Bila saya diijinkan maka saya akan menambahkan, 'terlalu muda untuk pensiun'*'. Bersaing, bermain, berkompetisi hingga akhir, itulah yang membuat seorang Sir Alex Ferguson akan terus dikenang sepanjang masa.

# MENCARI MAKNA NASIONALISME



**Judul Buku**

Nasional Is Me

**Penulis**

Pandji Pragiwaksono

**Penerbit**

Bentang Pustaka

**Bahasa**

Indonesia

**Kolasi**

xiv , 330 hlm ; 20,5 cm

**Tahun terbit**

2010

*“Kalau orang-orang tahu apa yang saya tahu tentang Indonesia, mereka juga akan optimis,” (Pandji – p.3).*

Berawal dari sebuah wawancara, Pandji mulai bercerita dan menularkan optimismenya ke berbagai kota di Indonesia, termasuk bagaimana seorang Pandji memaknai apa itu nasionalisme. Dari bab “dari Sabang sampai Merauke” yang menceritakan bagaimana luar biasanya tiap tiap daerah di Indonesia sampai pada bab “ dari sebuah krisis sampai pada perasaan optimis” yang mengungkap bagaimana hebatnya perekonomian dalam negeri di Indonesia.

Bagi, Pandji, nasionalisme itu sebuah paham yang meyakini bahwa perbedaan dalam sebuah Negara harus dipersatukan. Nasionalisme itulah pengikat berbagai ras, suku dan agama yang benar-benar majemuk di Indonesia.

Buku Pandji ini mengajak bagi yang membacanya untuk memaknai nasionalisme dari berbagai sudut pandang. Nasionalisme tidak sekadar hadir ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion bola, atau ketika kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Nasionalisme hadir di setiap lini kehidupan. Dengan nasionalisme, kartel, korupsi juga bisnis-bisnis curang bisa pelan-pelan kita singkirkan.



## **PERTANYAAN**

Saya lihat setahun terakhir KPPU cukup sering melakukan sidak ke beberapa daerah, seperti sidak di Rumah Potong Hewan (RPH), sidak ke pasar beras, sidak ke peternak sapi sampai sidang komoditas pangan seperti bawang di Nganjuk, Jawa Timur dulu kala. Pertanyaan saya, sebenarnya apa yang mau disasar KPPU ini? Saya masih awam bagaimana korelasi antara sidak dengan proses penegakan hukum di internal KPPU? Terima kasih.

**-SR-**

## **JAWABAN**

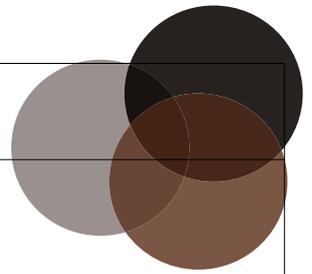
Sidak, itu bagian dari Investigasi. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap tren yang sedang berkembang, yaitu persekongkolan bisnis di komoditas pangan.

Investigasi atau sidak tersebut dibangun sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap tren yang sedang berkembang.

Salah satu sumber perkara itu tidak hanya bersumber dari laporan masyarakat, namun KPPU berinisiatif melakukan kajian dan investigasi dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perekonomian nasional. Maka dari itu, KPPU lebih mendahulukan pencegahan dibandingkan penindakan.

Sebagai contoh perkara sapi. Tentunya KPPU melakukan kajian internal dan eksternal terlebih dahulu. Dan diperoleh fakta di lapangan kalau harga sapi naik cukup naik signifikan, dan ini KPPU melihat ada yang tidak beres.

Juga untuk dipahami, sidak adalah salah satu cara memetakan isu yang ada di lapangan, tidak melulu dalam konsep gelaran atau investigasi (mencari peristiwa hukum).



## **PERTANYAAN**

Terkait soal merger, apakah KPPU bisa membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham seperti yang tertera di pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5/1999 (kaitannya dengan PP 57 Tahun 2010). Lalu bagaimana status hukum perusahaan yang telah berakhir karena hukum akibat mengikuti penggabungan atau peleburan yang kemudian mergernya dibatalkan oleh KPPU?

## **JAWABAN**

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut maka KPPU berwenang membatalkan persetujuan penggabungan yang sebelumnya telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham).

Sementara itu berdasarkan pasal 122 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan dengan jelas bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

Oleh karena itu, ditilik dari pasal tersebut, maka status perseroan sebelum melakukan penggabungan atau peleburan telah berakhir karena hukum dan berubah menjadi perseroan yang telah menggabungkan diri atau meleburkan diri. Namun, status hukum setelah perseroan menggabungkan diri tapi kemudian dibatalkan karena alasan apapun tidak diatur dalam UU No. 40/2007. Hal tersebut juga tidak diatur dalam UU No. 5/1999 jo PP 57/2010.

## SISI EDUKATIF PERMAINAN TRADISIONAL

# Bersaing Sehat, Hati Senang, Banyak Teman

**A**da banyak pendapat yang berkembang bahwa generasi 80-an dan 90-an adalah generasi emas. Kenapa? Karena yang mengalami era tersebut dipastikan mengalami waktu bermain dengan permainan tradisional yang seru. Dan sekarang, permainan tradisional itu tergerus zaman, digantikan dengan kehadiran gadget.

Meski tak semewah seperti ketika bermain dengan gadget, *playstation* misalnya, mainan tradisional mendorong seorang anak hidup lebih sehat karena membuat badan terus saja bergerak. Selain itu, mainan tradisional biasanya mendorong anak untuk berinteraksi, bekerjasama sekaligus berkompetisi. Risiko paparan radiasi dari layar komputer pun tak ada. Lalu apa saja jenis permainan dan manfaat apa yang bisa diperoleh dengan permainan tradisional ini?

### Gobak Sodor

Gobak sodor biasa juga disebut galah asin. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang beranggotakan kurang lebih tiga sampai dengan lima anak. Permainan yang membutuhkan kerjasama tim ini cukup menguras tenaga. Tiap kelompok diharuskan untuk mempertahankan daerahnya selagi lawan berusaha menerobos untuk melewati pertahanan.

Selain membuat badan berkeringat deras, karena harus bergerak lincah, gesit dan berlari, gobak sodor mengajarkan tentang arti kerjasama untuk mempertahankan 'benteng'. Permainan ini juga mengajar kejujuran, yakni ketika menjaga lawan diharuskan tidak melebihi garis yang sudah dibuat.

Nilai moral lain dari gobak sodor adalah nilai kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua kelompok, nilai kebersamaan antar pemain, nilai sportifitas dalam permainan, nilai pantang menyerah, serta nilai untuk menerima kekalahan dan tidak sombong ketika menang.

## Kelereng

Jangan dikira permainan anak yang berupa saling menembak kelereng tidak membutuhkan kejujuran. Biasanya permainan anak satu ini membutuhkan beberapa pemain.

Ada beberapa teknik bermain kelereng ini. Misalnya, permainan saling membidik kelereng lawan pada jarak tertentu. Kalau satu pemain mampu membidik dan bidikannya mengenai kelereng lawan, itu artinya dia berhak mendapatkan kelereng lawan



triptrus.com

▶ Permainan Kelereng

tersebut. Letak kejujuran tersebut adalah ketika menentukan jarak bidikan. Bisa jadi seorang pemain menggeser letak kelerengnya sehingga jarak bidikannya semakin dekat.

Permainan anak seperti yang di atas bisa saja ajang perkelahian ketika kecurangan tersebut diketahui pemain yang lain dan yang melakukan kecurangan tidak mau mengakui kecurangannya. Memang biasanya pemain lawan akan memberi tanda letak tempat bidikan. Tapi kalau pemainnya banyak, bisa jadi pemain lawan tidak melihat pergerakan seorang pemain yang menggeser letak kelerengnya.

Penentuan letak bidikan adalah dengan cara para pemain secara bergiliran melempar kelereng-kelereng para pemain. Dari lemparan tersebut dilihat jarak terjauh dan terdekat kepada lubang acuan. Kelereng yang terjauh berhak membidik kelereng yang lebih dekat ke lubang acuan.

## Tebak-Tebakan

Salah satu permainan anak yang melatih kejujuran adalah. Permainan anak satu ini tidak

membutuhkan alat peraga atau ruang yang luas. Anak-anak yang akan main ini tinggal menentukan apa yang akan mereka tebak.

Contohnya, mereka bermain dengan kancing-kancing bekas atau kelereng. Masing-masing peserta menyimpan kancing atau kelereng di tangannya. Lalu mereka menebak jumlah kancing atau kelereng yang ada di genggam tangan semua peserta dan menghitung total jumlah kancing atau kelereng termasuk yang dimilikinya. Misalnya, A menggenggam 3 buah, B menggenggam 4 buah, C menggenggam 1 buah. Total semuanya 8 buah. Yang bisa menebak tepat akan mengambil kancing atau kelereng punya yang lain.

Permainan anak ini melatih kejujuran karena bisa saja peserta menjatuhkan kancing atau menyembunyikan kelereng yang telah digenggamnya. Kancing yang bentuknya lucu dan unik itu cukup bernilai di mata anak-anak karena bisa dijadikan mata boneka atau pemanis tas buatan sendiri. Barang lain yang bisa dijadikan bahan adalah permen.

mrdhanisaputra.blogspot.co.id



▶ Permainan Tebak-Tebakan

Ada yang menilai bahwa permainan anak ini seperti judi karena mengajarkan menebak dan berspekulasi. Tapi bila diamati dengan lebih saksama, permainan anak ini melatih anak agar mampu melihat mimik wajah orang lain dan menganalisa apakah orang tersebut menyembunyikan sesuatu atau tidak.

Dari melihat dan mengamati ekspresi wajah tersebut, anak akan

tahu apabila seseorang gelisah karena isi hatinya bisa ditebak atau seseorang itu merasa bangga karena isi hatinya tak bisa ditebak. Pandai membaca ekspresi wajah ini akan sangat penting dalam kehidupan anak selanjutnya terutama kalau dia akan menjadi seorang pebisnis.

Menebak perasaan orang lain juga bisa membuat anak belajar berempati. Jadi permainan anak ini bukan mengajarkan untuk berspekulasi tapi mengajarkan anak agar mampu memiliki rasa percaya diri tinggi dan berani mengambil risiko. Nantinya ketika dewasa mereka tidak takut mengambil keputusan cepat.

Dalam permainan ini, masing-masing peserta harus bergantian menebak. Kalau diberlakukan peraturan cepat-cepatan menebak juga tidak jadi masalah. Kalau ternyata tebakan mereka sama, yang benar tinggal membagi hasil yang didapatkan. Jadi permainan anak ini juga mengajarkan cara berkompromi dan bernegosiasi. Dalam hal ini, anak sudah mengerti bahwa semua hal itu ada solusi dan bisa dibicarakan.

Permainan anak ini cocok dimainkan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Pada usia 7-12 tahun itu anak sudah bisa mengendalikan emosinya. Bila permainan anak dimainkan oleh anak usia TK, ada baiknya didampingi oleh orangtua. Pada usia TK tersebut biasanya masih cukup sulit bagi seorang anak untuk menerima kekalahan.

Untuk anak usia SMP dan SMA ke atas, permainan anak ini akan semakin seru ketika mereka menggunakan bahan tebakan yang lebih menantang. Misalnya, mereka cukup menuliskan angka atau menyimpan angka tertentu dalam pikirannya berupa 1-10. Tebakan yang tepat tentunya harus diiringi dengan kemampuan menganalisa ekspresi wajah dan mengasah instuisi. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam permainan seperti ini. *(dari berbagai sumber)* □

## 'MATIKAN' MAFIA KOMODITAS PANGAN

**P**ada suatu ketika, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas pernah mengeluarkan rumus tentang perilaku korupsi di negeri ini. Menurut Busyro, ketika demokrasi di suatu lembaga memenuhi unsur  $C=D+M-A$  maka lembaga itu cenderung koruptif.

C merupakan corruption atau korupsi, D merupakan *discretionary* alias kewenangan penentuan kebijakan, M adalah *monopoly* dan A adalah *accountability* atau pertanggungjawaban. Maka, korupsi dan penyalahgunaan wewenang cenderung terjadi di sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, bersifat monopoli dan tanpa akuntabilitas.

Aku saja, saat ini lemahnya sisi hukum pidana maupun dari sisi hukum persaingan usaha menyebabkan persekongkolan dalam menentukan pemegang kuota impor. Apalagi dalam hampir semua komoditas pangan terdapat disparitas harga yang sangat besar antara harga dalam negeri dengan harga luar negeri. Hal ini memberi insentif bagi calon pemegang kuota untuk menyuap dalam jumlah sangat besar.

Belum lagi budaya birokrasi negeri ini yang tidak transparan, pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktik kartel maupun korupsi. Pelaku usaha 'nakal' bisa dengan mudah masuk ke sistem birokrasi, mempengaruhi kebijakan lalu kemudian mengatur pasokan komoditas pangan tersebar di pasaran. Selanjutnya bisa ditebak, akan terjadi penetapan harga (*price fixing*).

Lalu masyarakat kita, yang seolah menganggap hal ini wajar, tidak berani bertindak. Mereka

menganggap wajar jika barang langka maka harga naik. Mafia pun diuntungkan. Keuntungan eksekusif diperoleh para mafia, raup untung besar pun diraih.

Bahkan, sering pula pejabat di negeri ini tunduk dengan pemodal, alias tunduk (kalah) dengan mafia. Dengan jelas diatur ketika berbisnis di negara manapun, maka pelaku usaha harus tunduk dengan aturan hukum yang ditetapkan. Sayangnya, ketika terjadi penumpukan pangan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Operasi pasar hanya berjalan bak gertak sambal, berjalan sekedar rutinitas.

Maka, kembalikan kedaulatan pengelolaan pangan ini ke negara. Lembaga negara seperti KPPU dan KPK harus benar-benar hadir, terlibat di penegakan hukumnya. Jika selama ini peran pemerintah sebatas menstabilkan harga, berikan wewenang lebih ke kedua lembaga ini.

Benahi juga di hulu produksi dengan meningkatkan efisiensi produksi pangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga pangan impor dan produksi dalam negeri.

Saat ini, pemerintah perlu segera mengubah pola manajemen tata niaga komoditas pangan yang memberlakukan kontrol ketat di hulu (melalui sistem kuota yang rawan korupsi) tetapi sangat liberal (bahkan tanpa pengawasan) di sisi hilir. Pola Manajemen seperti ini sangat rawan korupsi dan praktek kartel untuk memperoleh eksekusif profit yang merugikan masyarakat kecil. []

K  
TAR  
R  
T  
E  
L  
G  
E  
T

